



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Perkotaan Gemolong sebagai kota mandiri terpadu yang nyaman dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang, diperlukan pengaturan percepatan penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 140 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190));
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1).

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan luas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
21. Sub-Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial

dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.

27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
29. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut dengan zona badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
33. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
36. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
37. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
38. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
39. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan

bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

40. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
41. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
42. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
44. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
45. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
46. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
48. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
50. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

51. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
55. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
57. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
58. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air.
59. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
60. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
61. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
62. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

63. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
70. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
71. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
72. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
 Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. Ruang lingkup Wilayah Perencanaan, dan
 - b. Ruang Lingkup Substansi.
- (2) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 3.274,03 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat koma nol tiga) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, yang meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Gemolong dengan luas 326,38 (tiga ratus dua puluh

- enam koma tiga delapan) hektar;
 - b. seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan) hektar;
 - c. sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 237,28 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektar;
 - d. sebagian Desa Tegaldowo dengan luas 222,49 (dua ratus dua puluh dua koma empat sembilan) hektar;
 - e. seluruh Desa Purworejo dengan luas 280,97 (dua ratus delapan puluh koma Sembilan tujuh) hektar;
 - f. seluruh Desa Jenalas dengan luas 259,46 (dua ratus lima puluh Sembilan koma empat enam) hektar;
 - g. seluruh Desa Kalangan dengan luas 232,29 (dua ratus tiga puluh dua koma dua sembilan) hektar;
 - h. seluruh Desa Nganti dengan luas 208,63 (dua ratus delapan koma enam tiga) hektar;
 - i. seluruh Desa Genengduwur dengan luas 239,18 (dua ratus tiga puluh Sembilan koma satu delapan) hektar;
 - j. seluruh Desa Peleman dengan luas 357,20 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua nol) hektar;
 - k. sebagian Desa Jatibatur dengan luas 276,19 (dua ratus tujuh puluh enam koma satu sembilan) hektar; dan
 - l. seluruh Kelurahan Kwangen dengan luas 284,77 (dua ratus delapan puluh empat koma tujuh tujuh) hektar.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 686,41 (enam ratus delapan puluh enam koma empat satu) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Kwangen dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 337,22 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua dua) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 124,37 (seratus dua puluh empat koma tiga tujuh) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 108,75 (seratus delapan koma tujuh lima) hektar; dan
 - d) Sub Blok D dengan luas 52,45 (lima puluh dua koma empat lima) hektar.
 - 2. Blok 2 meliputi seluruh Kelurahan Ngembatpadas dengan luas 349,19 (tiga ratus empat puluh Sembilan koma satu sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a) Sub Blok A dengan luas 89,85 (delapan puluh sembilan koma delapan lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 69,84 (enam puluh sembilan koma delapan empat) hektar; dan
 - c) Sub Blok C dengan luas 189,51 (seratus delapan puluh sembilan koma lima satu) hektar.
 - b. SWP B, dengan luas 1.639,97 (seribu enam ratus tiga puluh Sembilan koma sembilan tujuh) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 - 1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Genengduwur, sebagian Desa Jenalas, dan Sebagian Desa Purworejo dengan luas 551,67 (lima ratus lima puluh satu koma enam tujuh) hektar, terdiri atas:

- a) Sub Blok A dengan luas 75,26 (tujuh puluh lima koma dua enam) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 110,01 (seratus sepuluh koma nol satu) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 77,52 (tujuh puluh tujuh koma lima dua) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 112,76 (seratus dua belas koma tujuh enam) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 91,05 (Sembilan puluh satu koma nol lima) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 85,07 (Delapan puluh lima koma nol tujuh) hektar.
2. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Genengduwur, Sebagian Desa Kalangan, Sebagian Desa Nganti, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 531,54 (lima ratus tiga puluh satu koma lima empat) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 51,65 (lima puluh satu koma enam lima) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 112,96 (seratus dua belas koma Sembilan enam) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 83,07 (delapan puluh tiga koma nol tujuh) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 103,80 (seratus tiga koma delapan nol) hektar; dan
 - e) Sub Blok E dengan luas 180,06 (seratus delapan puluh koma nol enam) hektar.
3. Blok 3 meliputi sebagian Desa Purworejo, Sebagian Desa Jenalas, Sebagian Desa Kalangan, dan Sebagian Desa Nganti dengan luas 556,76 (lima ratus lima puluh enam koma tujuh enam) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 137,48 (seratus tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektar; dan
 - b) Sub Blok B dengan luas 174,40 (seratus tujuh puluh empat koma empat nol) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 119,33 (seratus sembilan belas koma tiga tiga) hektar, dan
 - d) Sub Blok D dengan luas 125,56 (seratus dua puluh lima koma lima enam) hektar.
- c. SWP C, dengan luas 947,65 (Sembilan ratus empat puluh tujuh koma enam lima) hektar, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok 1 meliputi Sebagian Kelurahan Gemolong, Sebagian Desa Tegaldowo, dan Sebagian Kelurahan Kragilan dengan luas 434,90 (empat ratus tiga puluh empat koma Sembilan nol) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektar;
 - b) Sub Blok B dengan luas 100,66 (seratus koma enam enam) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 59,27 (lima puluh Sembilan koma dua tujuh) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 106,72 (seratus enam koma tujuh dua) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 59,53 (lima puluh Sembilan koma lima tiga) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 71,03 (tujuh puluh satu koma nol tiga) hektar.
2. Blok 2 meliputi Sebagian Desa Tegaldowo, Sebagian Desa Jatibatur, dan Sebagian Desa Peleman dengan luas 512,74 (lima ratus dua belas koma tujuh empat) hektar, terdiri atas:
- a) Sub Blok A dengan luas 106,39 (seratus enam koma tiga sembilan)

- hektar; dan
 - b) Sub Blok B dengan luas 58,71 (lima puluh delapan koma tujuh satu) hektar;
 - c) Sub Blok C dengan luas 73,33 (tujuh puluh tiga koma tiga tiga) hektar;
 - d) Sub Blok D dengan luas 126,62 (seratus dua puluh enam koma enam dua) hektar;
 - e) Sub Blok E dengan luas 90,86 (Sembilan puluh koma delapan enam) hektar; dan
 - f) Sub Blok F dengan luas 56,82 (lima puluh enam koma delapan dua) hektar.
- (1) Ruang lingkup WP, SWP, dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi
Pasal 3

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi;
- f. Kelembagaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WP
Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk Mewujudkan Kawasan Perkotaan Gemolong Sebagai Kota Mandiri Berbasis Perdagangan Jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Gemolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan energi;

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat lingkungan (PL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kawasan Perkotaan Gemolong terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok E.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SWP B Blok 2 Sub-Blok E;
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PL kecamatan; dan
 - b. PL kelurahan/desa.
- (5) PL kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terletak di SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
- (6) PL kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. SWP B Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - c. SWP B Blok 2 Sub-Blok B;
 - d. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - e. SWP C Blok 2 Sub-Blok B.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Gemolong digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer

- d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. jalan lingkungan sekunder;
 - g. terminal;
 - h. halte;
 - i. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - j. stasiun kereta api.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan kolektor primer meliputi:
- a. Ruas jalan Gemolong-Bts. Kab Grobogan, melalui:
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - b) Blok 3 Sub-Blok A.
 - 2) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A.
 - b. Ruas jalan Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong melalui SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
 - c. Ruas jalan Sidoharjo-Gabugan-Gemolong melalui:
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E.
 - 2) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - d. Ruas jalan Gemolong-Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui:
 - 1) SWP A berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - 2) SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 3) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong, melalui :
- a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - b. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok D dan Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Klentang-Jatibatur, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B.
 - 2) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F.
 - b. Ruas Jalan Ngebuk-Miri, melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
 - c. Ruas Jalan Peleman-Nganti, melalui :
 - 1) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b) Blok 3 Sub-Blok D.
 - 2) SWP C Blok 2 Sub-Blok C.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ruas jalan Brangkal–Kragilan, melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
 - b. Ruas jalan Citro Sancakan melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) SWP C, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan Blok 1 Sub-Blok C.
 - c. Ruas jalan Dempul melalui SWP A Blok 2 Sub-Blok C.
 - d. Ruas jalan gang 4 melalui SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - e. Ruas jalan gang Dahlia melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - f. Ruas Gang Kenanga melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - g. Ruas jalan Gang Masjid Fathul Iman melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - h. Ruas jalan Gang Mawar melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - i. Ruas jalan Gang Melati melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - j. Ruas jalan Gemolong melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok B.
 - k. Ruas jalan Gemolong-Ngebuk melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D.
 - l. Ruas jalan Jenalas–Nganti, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok B, Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D.
 - m. Ruas jalan Klentang-Jenalas, melalui SWP B, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F.
 - n. Ruas jalan Kragilan - Gemolong, melalui:
 - 1) SWP C Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok B;
 - 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 4) SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - o. Ruas jalan Kwangen-Ngebuk, melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) SWP A Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 3) SWP A Blok 1 Sub-Blok C.
 - p. Ruas jalan Ngasem–Nganti, melalui :
 - 1) SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 2) SWP B Blok 3 Sub-Blok D.
 - q. Ruas jalan Ngembat-Kwangen, melalui:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
 - r. Ruas jalan Purworejo-Jenalas, melalui:
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok E;
 - 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan
 - 4) SWP B Blok 3 Sub-Blok B.
 - s. Ruas jalan Sidodadi Mbolong Lor melalui :
 - 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan

- 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D.
- t. Ruas jalan Sidomulyo melalui:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) SWP A Blok 2 Sub-Blok A.
- u. Rencana jaringan jalan lokal sekunder lainnya melalui ruas jalan:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Gemolong melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok A.
 - b. Ruas jalan lingkungan primer lainnya melalui:
 - 1) SWP A Blok 2 Sub-Blok A;
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Ruas jalan Gang Arjuna melalui SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. Ruas jalan Mbah Citro melalui SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - c. Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya yang melalui:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - 3) SWP C terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-

- Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
- b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok F.
- (10) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Solo – Semarang yang melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 3) Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 4) Blok 3 Sub-Blok A.
- (11) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa stasiun penumpang kecil berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok A.
- (12) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
 Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
- b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
- c. gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:

- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
 Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan telepon *fixed line*, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-

Blok D.

- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jaringan bergerak seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C;
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan
 - b. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di SWP B Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, terdapat di:
 - a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E.
 - b. SWP C Blok 2 Sub-Blok B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan

- e. sumur pompa
- (2) Unit air baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transmisi air minum, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) unit distribusi dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. Hidran umum, terdapat di:
 - 1) SWP A terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b) Blok 2 Sub-Blok A.
 - 2) SWP B terdiri atas:
 - a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Sub-Blok E;
 - b) Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - c) Blok 3 Sub-Blok A.
 - 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok F.
 - b. Hidran kebakaran, terdapat di:
 - 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F.
- (6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan

- 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E.
- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja, terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di SWP C Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A.

- c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok E.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP B Blok 2 Sub-Blok A.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
 Pasal 14

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan drainase primer;
 - b. Jaringan drainase sekunder;
 - c. Jaringan drainase tersier; dan
 - d. Jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-

- Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
- 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (5) Jaringan drainase lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas:
- 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, berupa terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Tempat evakuasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), berada pada:
 - 1) Komplek Kantor Kelurahan Kwangen pada SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
 - 2) Komplek Kantor Kelurahan Ngembatpadas dan Lapangan Kelurahan Ngembatpadas yang pada SWP A Blok 2 Sub-Blok A;
 - 3) Komplek Kantor Desa Genengduwur pada SWP B Blok 1 Sub-Blok B;
 - 4) Komplek Kantor Kelurahan Gemolong pada SWP B Blok 1 Sub-Blok D;
 - 5) Komplek Kantor Desa Peleman pada SWP B Blok 2 Sub-Blok E;
 - 6) Eks Komplek SBI Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok A;
 - 7) Komplek Kantor Kecamatan Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok E;
 - 8) Komplek Kantor Kelurahan Kragilan pada SWP C Blok 1 Sub-Blok F;
 - 9) Komplek Kantor Desa Tegaldowo pada SWP C Blok 2 Sub-Blok F;
 - 10) SD Negeri Jenalas pada SWP B Blok 1 Sub-Blok F;
 - 11) SD Negeri Kalangan pada SWP B Blok 3 Sub-Blok C; dan
 - 12) SD Negeri Nganti pada SWP B Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA) berupa Edupark Gemolong dan Lapangan Suci pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok D; Sub-Blok E; Sub-Blok F.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B;
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 7,85 (tujuh koma delapan lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 42,93 (empat puluh dua koma sembilan tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
 Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 49,40 (empat puluh sembilan koma empat nol) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-Zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, seluas 15,80 (lima belas koma delapan nol) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Sub-Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas 8,36 (delapan koma tiga enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, seluas 11,69 (sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok

- E; dan
- 3. Blok 3 Sub-Blok A.
- c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E.
- (5) Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 13,55 (tiga belas koma lima lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan
 - 2. Blok 3 Sub-blok A.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Pariwisata (W);
- d. Zona Perumahan (R);
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- f. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- g. Zona Perkantoran (KT);
- h. Zona Transportasi (TR); dan
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 111,69 (seratus sebelas koma enam sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
- b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
- c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan

2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 23

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 1.504,20 (seribu lima ratus empat koma dua nol) hektar, terdiri atas :
- a. Sub-Zona tanaman pangan (P-1); dan
 - b. Sub-Zona hortikultura (P-2).
- (2) Sub-Zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.490,19 (seribu empat ratus sembilan puluh koma satu sembilan), terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14,02 (empat belas koma nol dua) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:
- a. Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b. Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.

Paragraf 3
Zona Pariwisata
Pasal 24

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c seluas 1,53 (satu koma lima tiga), terdapat di SWP A Blok 1 Sub-Blok C dan SWP B Blok 1 Sub-Blok D.

Paragraf 4
Zona Perumahan
Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 1.262,66 (seribu dua ratus enam puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri atas:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan

- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 329,44 (tiga ratus dua puluh sembilan koma empat empat) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 835,45 (delapan ratus tiga puluh lima koma empat lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A, Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 97,77 (Sembilan puluh tujuh koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP B terdiri atas:
 - a. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - b. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 47,33 (empat puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 31,15 (tiga puluh satu koma satu lima) hektar, terdapat di :
 - a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.

- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di :
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 3 Sub-Blok A.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,38 (sembilan koma tiga delapan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 242,12 (dua ratus empat puluh dua koma satu dua) hektar, terdiri atas :
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas seluas 62,21 (enam puluh dua koma dua satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2. Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D;

2. Blok 2 Sub-Blok B; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok D.
 - c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, seluas 164,44 (seratus enam puluh empat koma empat empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B.
 - b. SWP B terdiri atas:
 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B.
 - c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 7
Zona Perkantoran
Pasal 28

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok A
- b. SWP B terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; dan
 3. Blok 3 Sub-Blok A.
- c. SWP C terdiri atas :
 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok F.

Paragraf 8
Zona Transportasi
Pasal 29

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf h seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar, terdapat di :

- a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A;
- b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan
- c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar, terdapat di SWP B Blok 1 Sub-Blok D dan SWP C Blok 1 Sub-Blok A.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 32

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong 2023-2043, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e adalah aturan dasar yang meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 35

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya; dan
- c. Ketentuan teknis zonasi.

Paragraf I
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang
Zona Lindung
Pasal 36

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);

- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3);
- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
- e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
- f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sub-Zona RTH Jalur Hijau (RTH-8).

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan serta Intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budidaya

Pasal 37

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona tanaman pangan (P1);
- c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pariwisata (W);
- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2);
- e. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3);
- f. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R4);
- g. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
- h. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
- i. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3);
- j. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K1),
- k. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP (K2),
- l. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP (K3);
- m. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perkantoran (KT);
- n. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Transportasi (TR); dan
- o. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Paragraf 3

Ketentuan Teknis Zonasi

Pasal 38

- (1) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf c,

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan;
 - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. T2 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya; dan
 - c. T3 meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas:
- a. B1 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin);
 - c. B3 meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permaianan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter;
 - d. B4 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW; dan
 - e. B5 meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (pengolahan limbah, parkir dan RTH).
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (6) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Dinas atau Kementerian yang membidangi urusan perindustrian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Dinas yang membidangi urusan perumahan;
 - c. Badan Usaha Milik Negara yang membidangi perkeretapian, yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
 - d. Dinas yang membidangi urusan sumber daya air; dan
 - e. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo; atau
 - f. Instansi lain yang terkait.
- (7) Izin atau persetujuan Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Perda RTRW.

- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.
- (3) Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
- a. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Luas kavling minimum sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - d. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa garis sempadan bangunan (GSB) minimum yang terdiri atas:
- a. GSB minimum terhadap as jalan;
 - b. GSB minimum terhadap talud/pinggir sungai;
 - c. GSB minimum terhadap talud/pinggir saluran irigasi; dan
 - d. GSB minimum terhadap saluran drainase terluar rel kereta api.
- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,5 meter hingga 3 meter atau lebih;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. Jalur pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian dengan jalur kendaraan bermotor dengan perbedaan tinggi maksimal antara jalur pejalan kaki dengan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter;
 - d. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - e. Jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan jalan kolektor adalah 1,2 meter, sedangkan jalan arteri adalah 1,8 meter dan
 - f. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat pemberhentian dan halte bus dengan luas 1,5 meter X 2,4 meter.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam
- (4) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan tanaman dalam pot, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhierarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, sempadan waduk,

- pemukaman sesuai standar; dan
- e. zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 20%.
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH dengan perkerasan yang memiliki fungsi resapan air dan Ruang Terbuka Biru seperti kolam retensi;
 - e. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - f. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan.
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, Apotek, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;

- e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor; dan
 - f. Jalan lingkungan perumahan minimal 6 meter
- (8) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 - g. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan public;
 - h. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot seluas 200 m²; dan
 - i. Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m²).
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana minimal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e merupakan aturan tambahan yang menumpang-susunkan (*overlay*) diatas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri,

terdiri atas:

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Kawasan Sempadan;
 - e. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
 - f. Kawasan Pertahanan dan Kemanan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. Ketentuan tata bangunan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang Zona Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a seluas 372,19 (tiga ratus tujuh puluh dua koma satu sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan; dan
 3. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 44

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Resiko Banjir; dan
 - b. Kawasan Kerentanan Gerakan Tanah
- (2) Ketentuan khusus kawasan resiko banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 298,98 (dua ratus Sembilan puluh delapan koma sembilan delapan) hektar berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi terdapat di:
- a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; dan Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa rawan bencana banjir skala sedang sampai tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2) wajib membuat sumur biopori; dan
 - 3) KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (4) Ketentuan khusus Kerentanan Gerakan Tanah menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 83,12 (delapan puluh tiga koma satu dua) hektar terdapat di:
- a. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Sub-Blok E; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C.
 - b. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E.
- (5) Ketentuan khusus rawan gerakan tanah berupa rawan gerakan tanah skala menengah sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar
 - b. pembangunan rumah tahan gerakan tanah sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. wajib melakukan modifikasi pengurangan sudut lereng sebelum pembangunan; dan
 - d. menanam tanaman keras berakar kuat dan dalam.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
 Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c seluas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektar terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F;
 - 2) Blok 2 Sub-Blok C; dan
 - 3) Blok 3 Sub-Blok C.
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter per segi per orang; dan
 - d. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d seluas 1,62 (satu koma enam dua) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B terdiri atas:
 - 1) Blok 2 Sub-Blok E; dan
 - 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D
 - c. SWP C Blok 2 Sub-Blok A dan Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan khusus zona khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketentuan tata bangunan berupa pengenaan GSB terhadap sungai sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. bangunan eksisting tidak diizinkan penambahan bangunan; dan
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (3) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e seluas 1.135,48 (seribu seratus tiga puluh lima koma empat delapan) Hektar, berupa sempadan sungai terdapat di:
 - a. SWP A terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C.
 - b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; dan
 - c. SWP C terdiri atas:
 - 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D, Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan
 - 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah ketentuan tata bangunan berupa pembatasan ketinggian bangunan dan intensitas bangunan:
 - a. Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbang; dan
 - b. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f seluas 2,15 (dua koma satu lima) Hektar, berada di SWP B Blok 1 Sub-Blok C.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dan Keharusan pada Kawasan pertahanan dan kemanan meliputi:
 1. Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton;
 2. Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 4 ton;
 3. dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan;
 4. Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah Latihan;
 5. Terdapat bufferzone; dan
 6. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI.
 - b. Larangan pada Kawasan pertahanan dan kemanan meliputi:
 1. Bebas dari jaringan Migas;
 2. Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak; dan
 4. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf g, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - c. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - d. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1 Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 50

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
 - a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional; dan
 - c. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif
Pasal 51

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (2) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Yang Didorong.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada Zona Kendali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah

terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 53

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Seragen tentang RDTR Kawasan Perkotaan Gemolong dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Kawasan Perkotaan Gemolong Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sragen menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gemolong Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

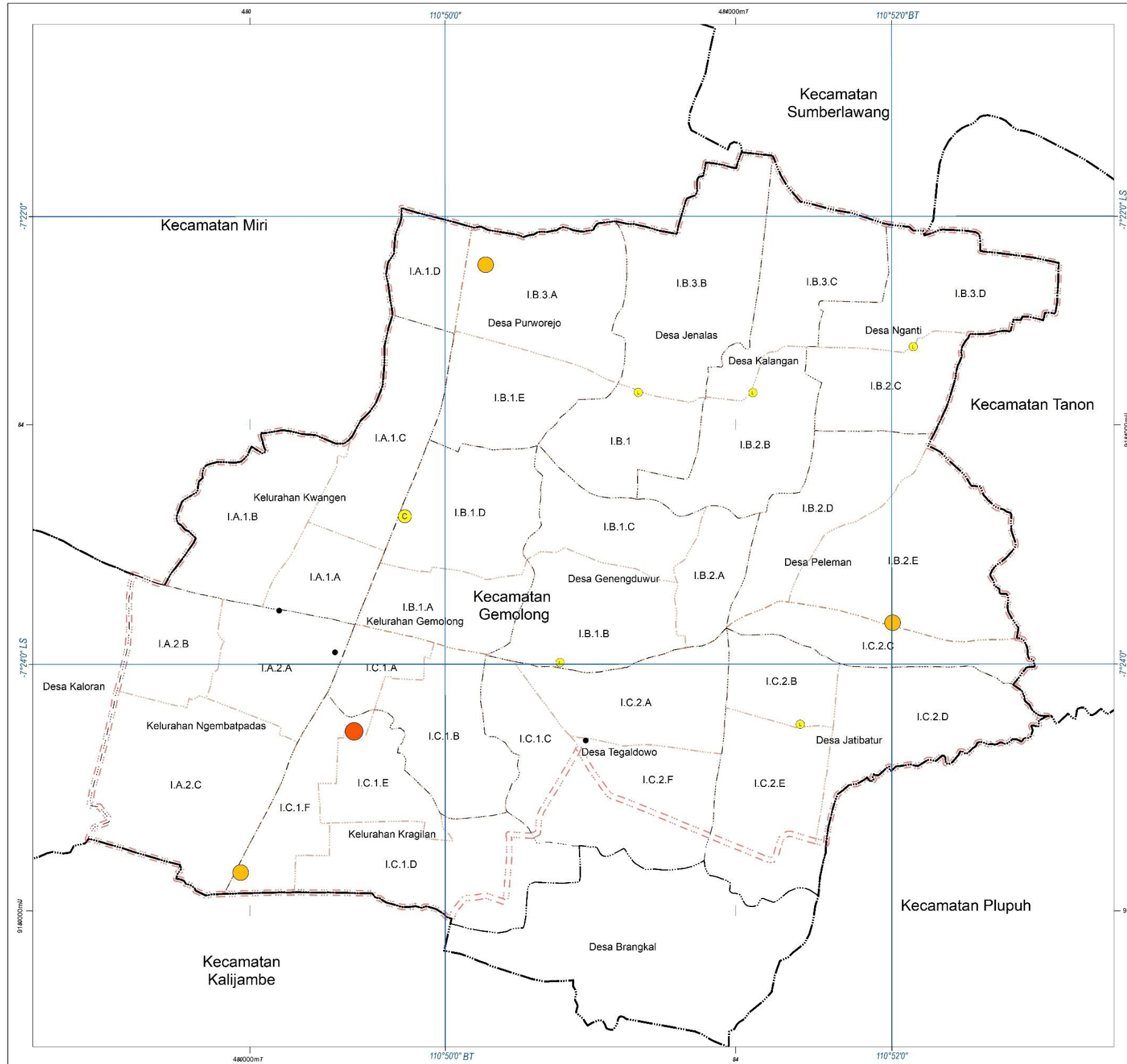
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kantor Kepala Bagian Hukum



DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:30.000
 0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

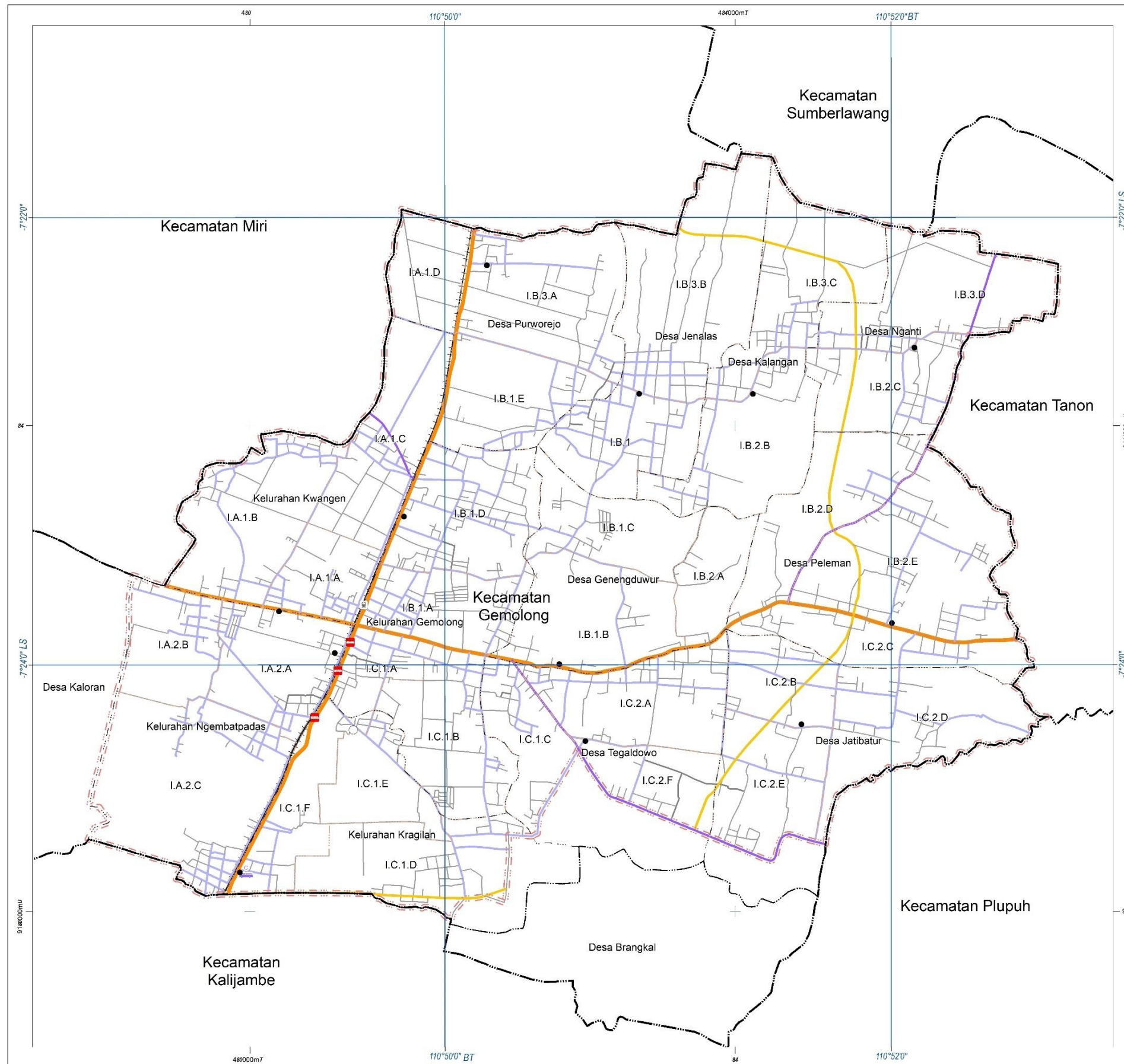
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkorkeksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043






PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Desa | Batas Kecamatan | Batas WP |
| | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP |
| | | Batas Blok |
| | | Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Terminal Penumpang Tipe C |
| | Halte |
| | Stasiun Penumpang Kecil |
| | Jalan Kolektor Primer |
| | Jalan Kolektor Sekunder |
| | Jalan Lokal Primer |
| | Jalan Lokal Sekunder |
| | Jalan Lingkungan Primer |
| | Jalan Lingkungan Sekunder |
| | Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

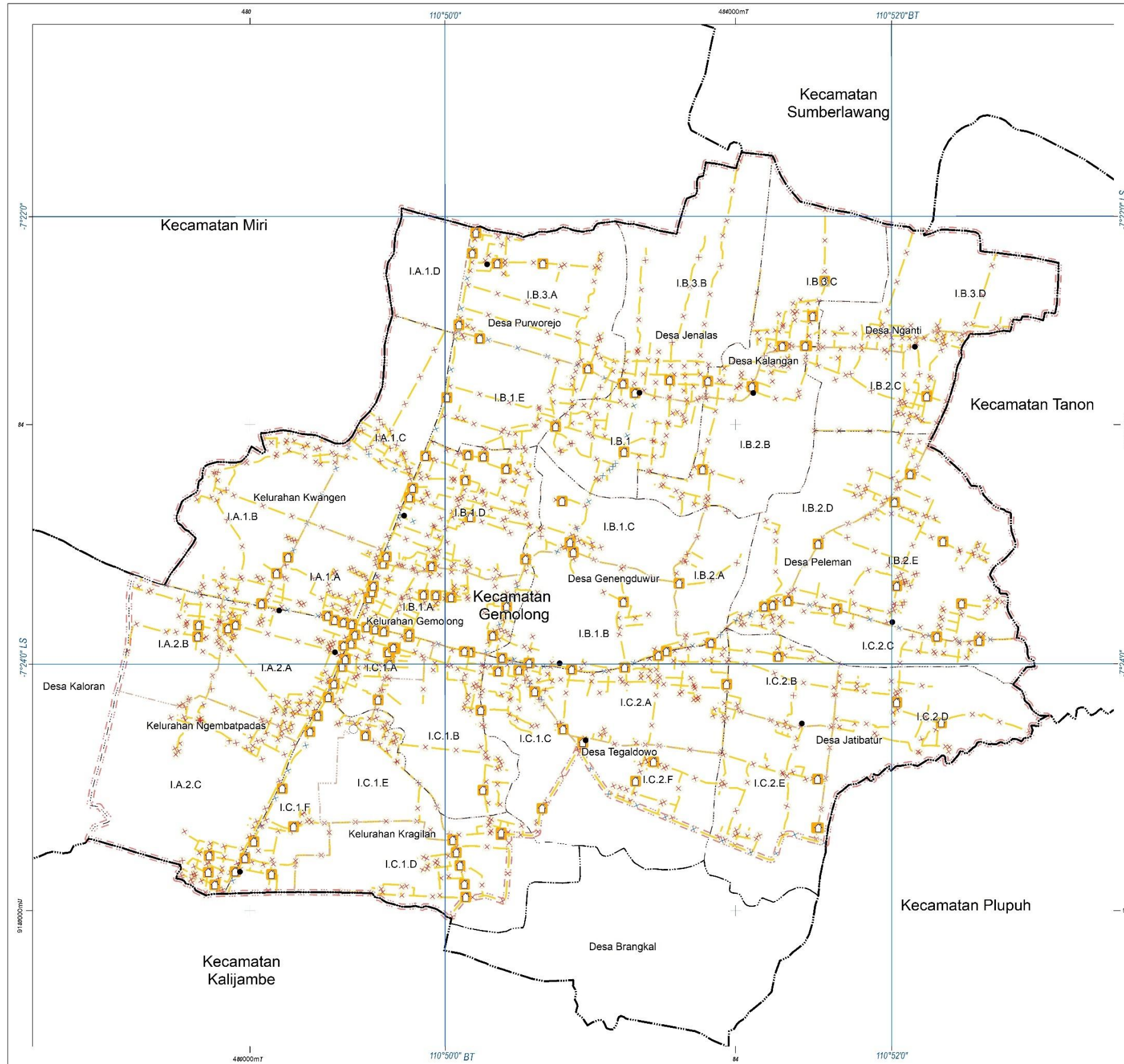
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



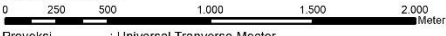


PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi

- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

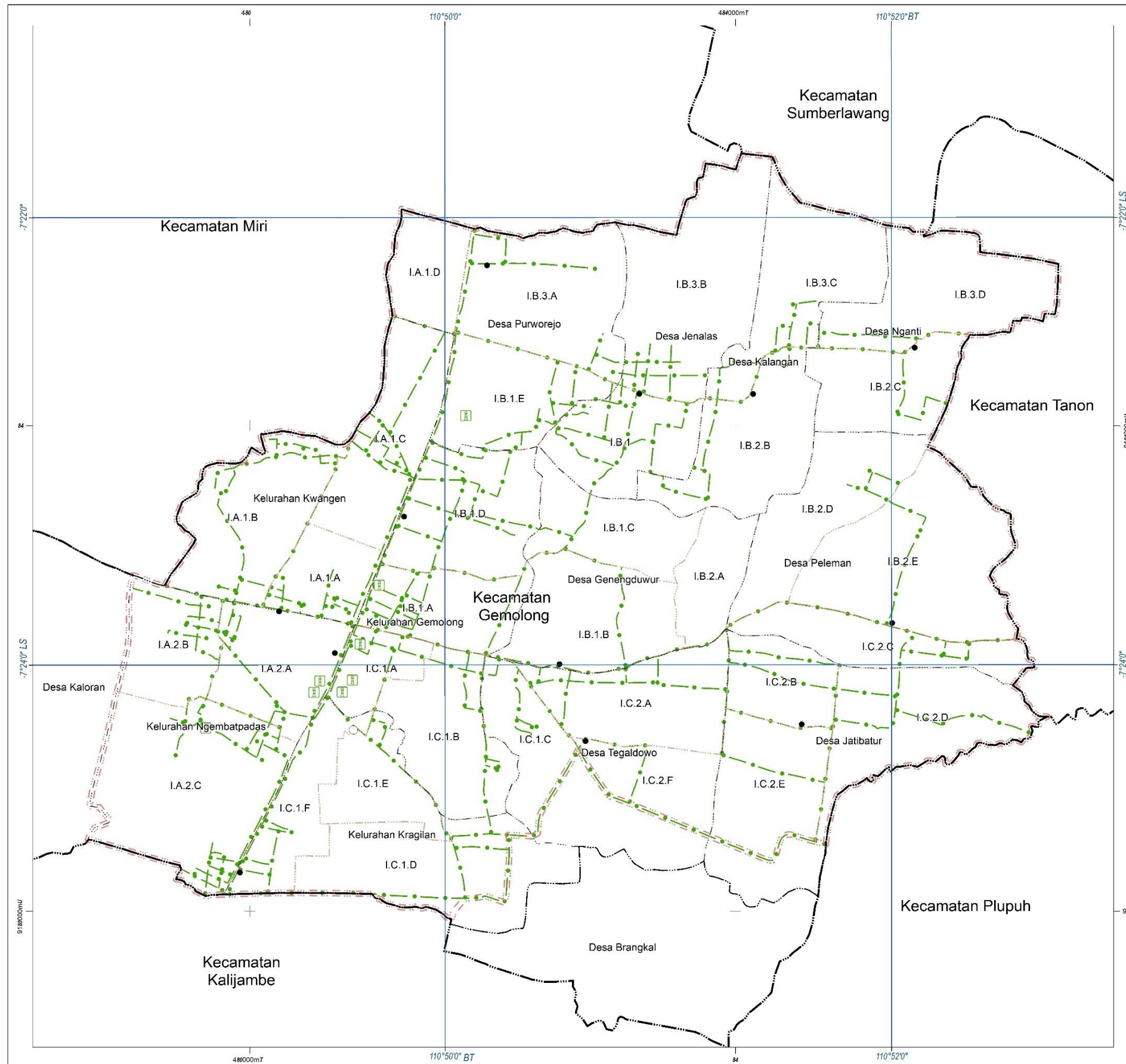
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA 1:30.000

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi

I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

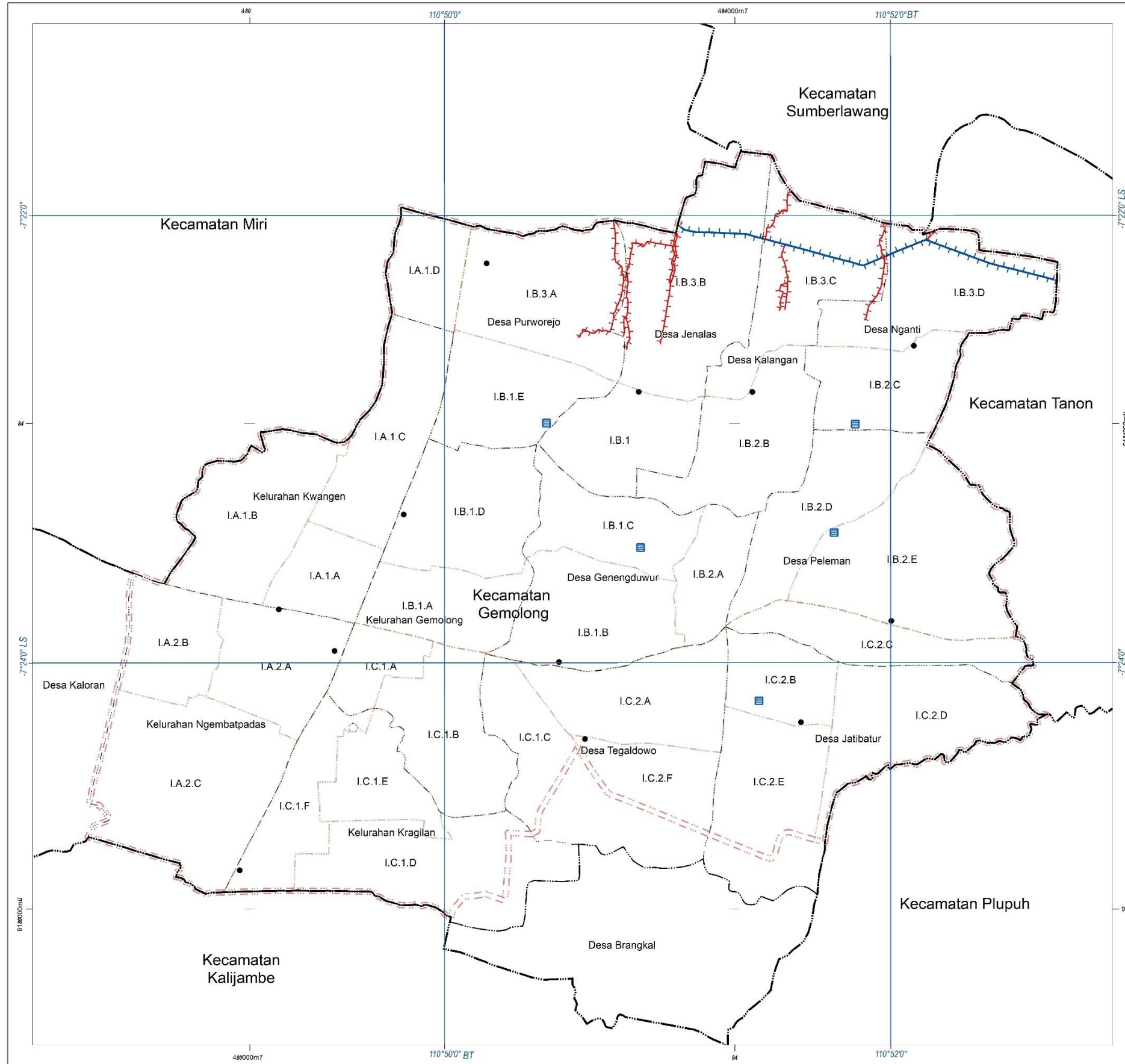
1. Citra Satelit Pleiades penekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:30.000
 0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ○ Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

□ Pintu Air
 --- Jaringan Irigasi Primer
 --- Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

IA.1.A
 I.A.1.A
 I.A.1.A
 I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

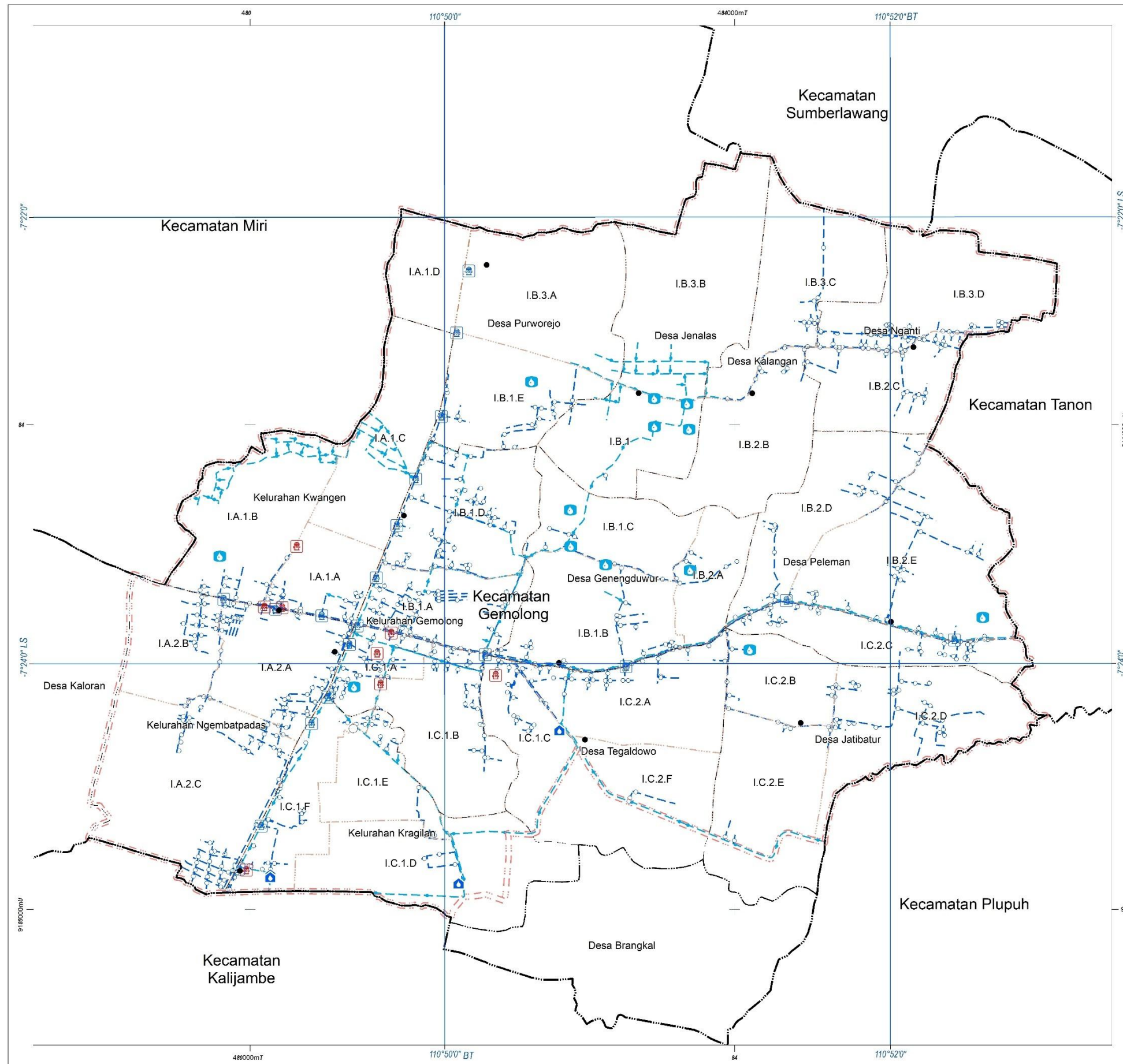
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah teroreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.F
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



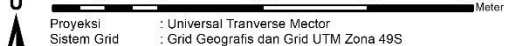


PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.F
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|--------------------|----------------------|----------------|
| Ibu Kota Kecamatan | Batas Kecamatan | Batas WP |
| Ibu Kota Desa | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP |
| | | Batas Blok |
| | | Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Hidran Kebakaran
- Hidran Umum
- Sumur Pompa
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

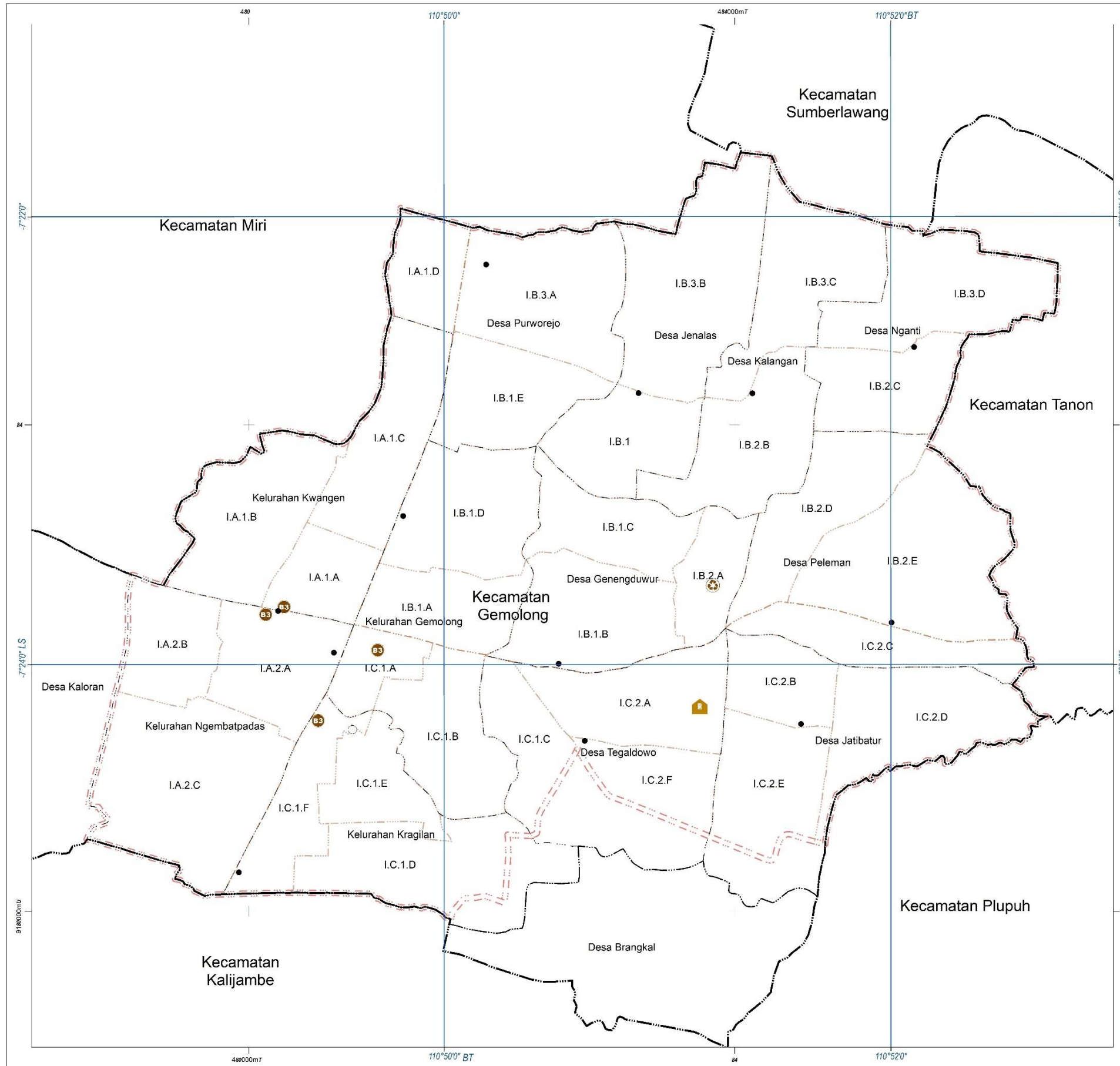
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.G
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



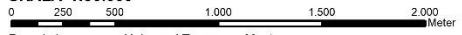


**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.G
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
 DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan
 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

-  IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
-  Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
-  Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Penjelasan Kode Lokasi

| | | | |
|------|-----|------|----------|
| IPAL | SWP | Blok | Sub Blok |
| 1.A | 1.B | 1.C | 1.D |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

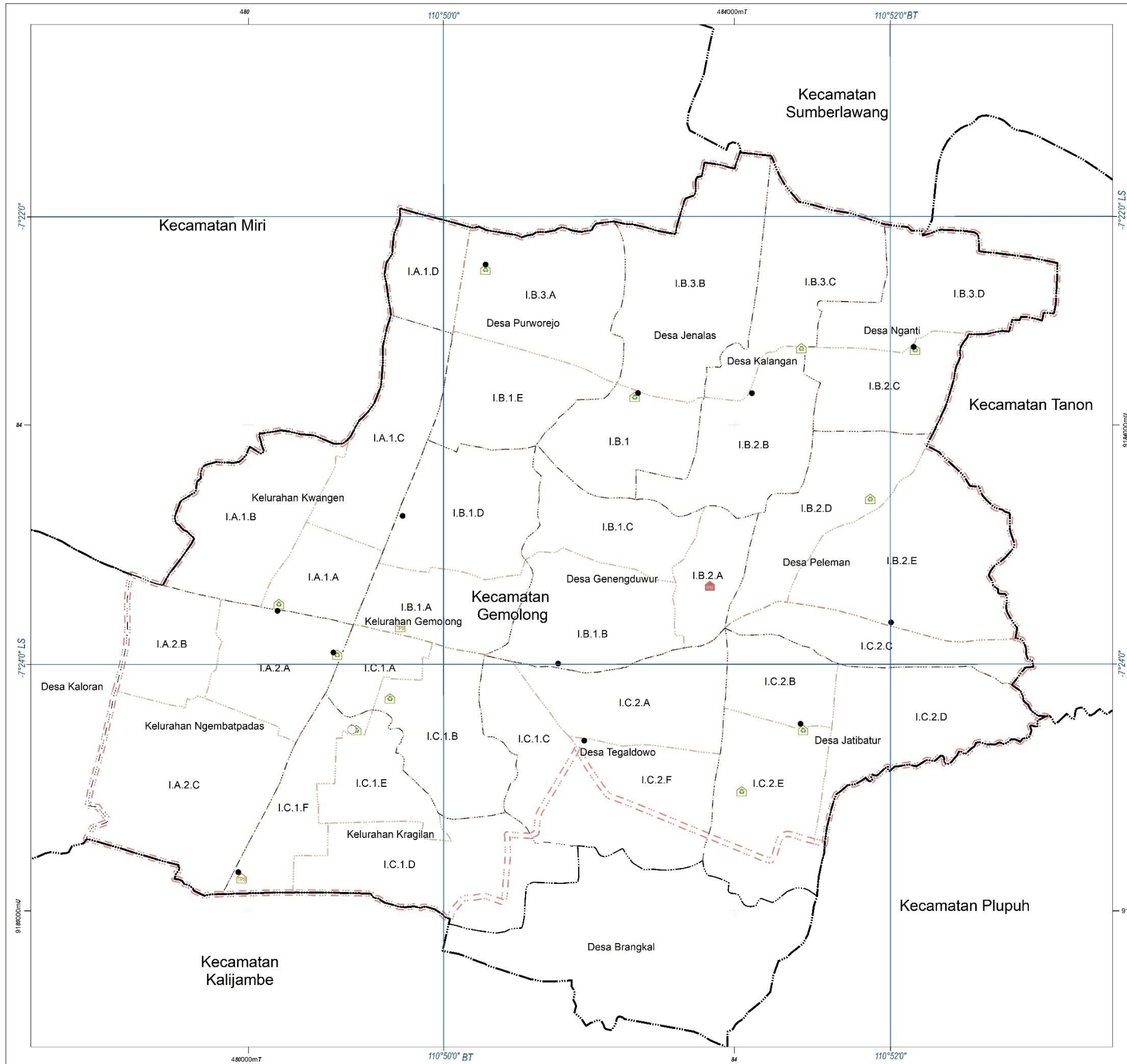
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.H
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



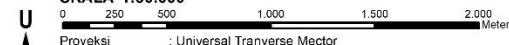


**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.H
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:30.000













Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|--|---|---|
|  Ibu Kota Kecamatan |  Batas Administrasi |  Batas Perencanaan |
|  Ibu Kota Desa |  Batas Kecamatan |  Batas WP |
| |  Batas Desa/Kelurahan |  Batas SWP |
| |  Batas Blok |  Batas Sub Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Persampahan**

-  Tempat Penampungan Sementara (TPS)
-  Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
-  Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

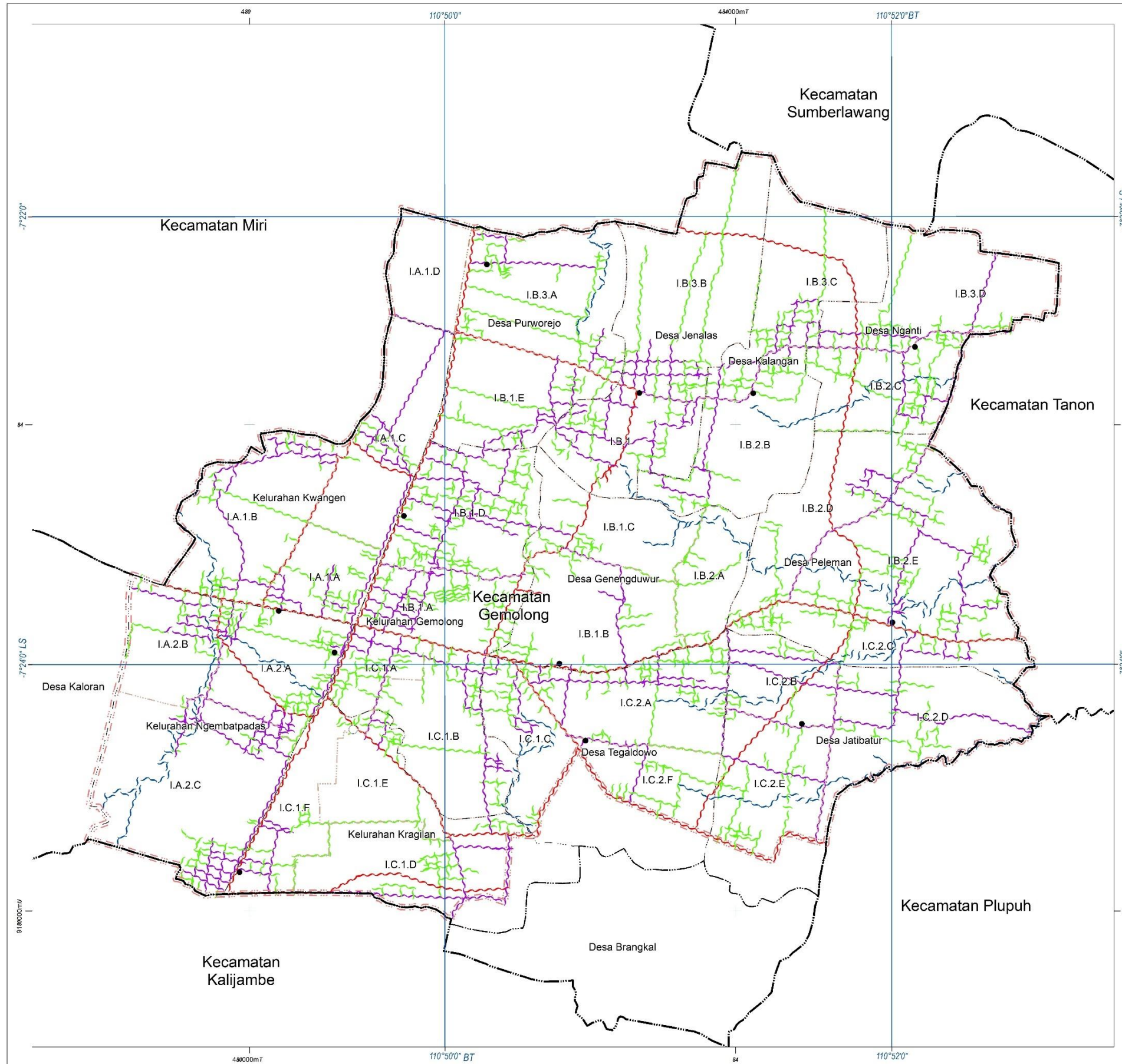
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



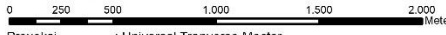


PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II.I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Drainase Lokal

Penjelasan Kode Lokasi

W.P. : Wilayah Perencanaan
 B.L. : Blok
 S.B. : Sub Blok

I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

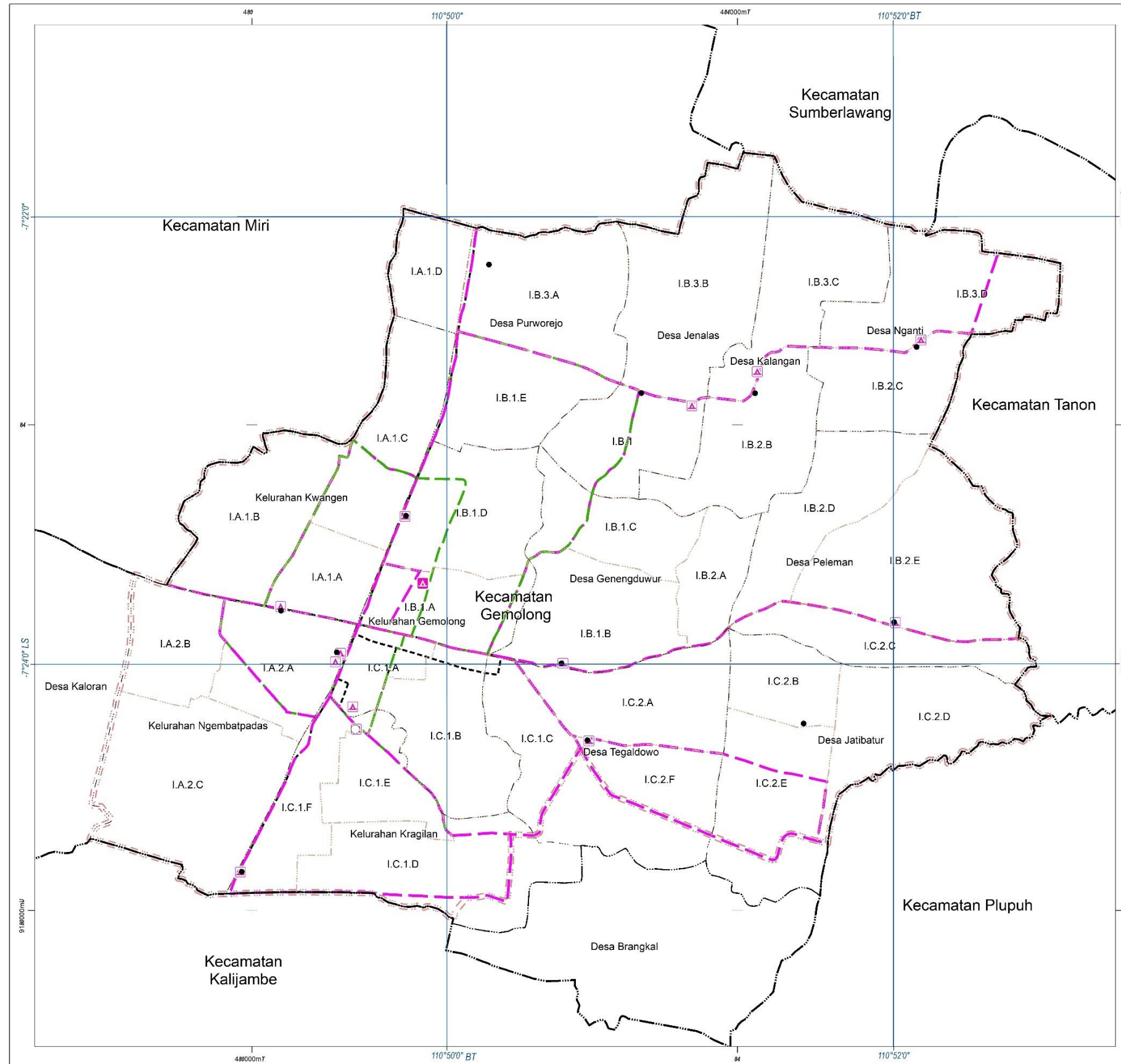
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah teroreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA 1:30.000
 0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ● Ibu Kota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya**

- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 |
| A. | Perwujudan Rencana Struktur Ruang | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (PPK) | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Penanganan perbaikan prasarana dan sarana pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan (PPK) | Kel. Kragilan yang terdapat di SWP C Blok 1 Sub-Blok E | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 2) Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 3) Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 4) Pengembangan pusat permukiman skala kota | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 5) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | b. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan (SPPK) | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 1) Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan | a. SWP B Blok 2 Sub-Blok E; b. SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan c. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 2) Penanganan perbaikan prasarana dan sarana Sub-Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK) | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, DISPERKIMTARU, DLH |
| | c. Pusat Lingkungan (PL) | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kecamatan PL Kecamatan | SWP B Blok 1 Sub-Blok D | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| | 2) Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kecamatan PL Kelurahan | a. SWP B Blok 1 Sub-Blok B; b. SWP B Blok 1 Sub-Blok F; c. SWP B Blok 2 Sub-Blok B; d. SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan e. SWP C Blok 2 Sub-Blok B | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bappeda Litbang, Disperkintaru, DLH |
| 2 | Rencana Jaringan Transportasi | | | | | | | | | | | | |
| 2.a | Pengembangan Jaringan Jalan | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer: | | | | | | | | | | | | |
| | a. ruas jalan Gemolong-Bts. Kab Grobogan, melalui : | 1) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok A 2) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab | DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | b. ruas jalan Bts. Kab. Karanganyar-Gemolong | SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab | DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | c. ruas jalan Sidoharjo-Gabungan-Gemolong melalui : | 1) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab | DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| | | Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E. 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | | |
| | d. ruas jalan Gemolong-Andong/Bts. Kab. Boyolali melalui: | 1) SWP A berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; 2) SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A; dan 3) SWP C berada di Blok 1 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab | DPU Bina Marga dan CK Prov DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | 2) Peningkatan dan pembangunan Jalan Kolektor Sekunder | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan lingkaran Kawasan Perkotaan Gemolong: - Perencanaan DED Jalan - Pembebasan Lahan - Pengembangan dan pembangunan jalan lokal primer menjadi jalan kolektor sekunder | 1) SWP B terdiri atas: a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok D dan Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | 3) Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer: | | | | | | | | | | | | |
| | a. Ruas Jalan Klentang-Jatibatur | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 2) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C, b) Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E, Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | b. Ruas Jalan Ngebuk-Miri | 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | c. Ruas Jalan Peleman-Nganti | 1) SWP B terdiri atas: a) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok E; dan b) Blok 3 Sub-Blok D 2) SWP C Blok 2 Sub-Blok C | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | 4) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan Lokal Sekunder : | | | | | | | | | | | | |
| | Ruas jalan Brangkal-Kragilan | SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Citro Sancakan | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) SWP C, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan Blok 1 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Dempul | SWP A Blok 2 Sub-Blok C | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan gang 4 | 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan gang Dahlia | SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|----|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | | | PJM-5 (2040-2043) |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| | ruas Gang Kenanga | SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Gang Masjid Fathul Iman | SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Gang Mawar | SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Gang Melati | SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Gemolong | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok B | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Gemolong-Ngebuk | SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok D | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Jenalas-Nganti | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 2) SWP B Blok 2 Sub-Blok B dan Blok 2 Sub-Blok C; 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok B, Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | Ruas jalan Klentang-Jenalas | SWP B, terdiri atas Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Kragilan - Gemolong | 1) SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok B; 3) SWP C Blok 1 Sub-Blok E; dan 4) SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | Ruas jalan Kwangen-Ngebuk | 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 2) SWP A Blok 1 Sub-Blok B; 3) SWP A Blok 1 Sub-Blok C; dan 4) SWP B Blok 1 Sub-Blok D | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Ngasem-Nganti | 1) SWP B Blok 2 Sub-Blok C; dan 2) SWP B Blok 3 Sub-Blok D | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Ngembat-Kwangen | 1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B 2) SWP C Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | Ruas jalan Purworejo-Jenalas | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok E; 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 3) SWP B Blok 3 Sub-Blok A; dan 4) SWP B Blok 3 Sub-Blok B. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | ruas jalan Sidodadi Mbolong Lor | 1) SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) SWP B Blok 1 Sub-Blok D | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | Ruas jalan Sidomulyo | 1) SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) SWP A Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |
| | Rencana jaringan jalan local sekunder lainnya | 1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|----|--|--|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | | | PJM-5 (2040-2043) |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| | | c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | | |
| | 5) Peningkatan Jalan Lingkungan Primer untuk mendukung aksesibilitas antar SWP: Ruas jalan Gemolong | SWP C Blok 1 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | Ruas jalan lingkungan primer lainnya melalui: | 1) SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; c) Blok 3 Sub Blok A; Blok 3 Sub-Blok D 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok C; dan b) Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | 6) Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder mendukung aksesibilitas: | | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | Ruas jalan Gang Arjuna | SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | Ruas jalan Mbah Citro | SWP C Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | Ruas jalan lingkungan sekunder lainnya | 1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; b) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan c) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. 3) SWP C terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | 2029 |
| | | Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan b) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | | |
| | 7) Pengembangan tata kelola pemanfaatan ruang disekitar jalan lingkungan sekunder | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | 8) Pembangunan jalur hijau dan RTH di sekitar rencana jalan lingkungan sekunder | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| | 9) Pemantauan kualitas udara pada titik-titik strategis | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab Dishub |
| | 10) Pembangunan saluran drainase yang dilengkapi sumur resapan dan biopori | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU Bidang Bina Marga Kab Desa, Disperkimtaru |
| 2.b | Terminal Penumpang | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan terminal penumpang tipe C | SWP C Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU Bidang Bina Marga Kab Dishub |
| 2.c | Halte | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan halte | SWP C Blok 1 Sub-Blok A dan Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Dishub. Masyarakat |
| | Perencanaan dan Pembangunan halte | Ruas jalan kolektor dan jalan lokal primer | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Dishub. Masyarakat |
| 2.d | Rencana jalur kereta api antarkota | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan jaringan jalur kereta api antar kota berupa <i>double track</i> Jalur Solo - Semarang | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; b. SWP A Blok 1 Sub-Blok C; c. SWP A Blok 1 Sub-Blok D; d. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; e. SWP A Blok 2 Sub-Blok C; f. SWP B Blok 1 Sub-Blok E; dan g. SWP B Blok 3 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | | APBN | PT KAI, Kementerian Perhubungan |
| 2.e | Revitalisasi dan pemeliharaan stasiun penumpang kecil yaitu Stasiun Salem | SWP B Blok 1 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | APBN | PT KAI, Kementerian Perhubungan |
| 3 | Rencana Jaringan Energi | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | SBWP A <ul style="list-style-type: none"> Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan Blok 2 Sub-Blok A. SBWP B <ul style="list-style-type: none"> Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan Blok 3 Sub-Blok A, Blok 3 Sub-Blok B | | | | | | | | | | | APBN | PLN |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|----|--|--|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | | | PJM-5 (2040-2043) |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| | | SBWP C <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; dan ▪ Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | a. SWP A terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBN | PLN | |
| | 3. Pengembangan dan pemeliharaan gardu distribusi | a. SWP A terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: | | | | | | | | | | | APBN | PLN |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|------------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | 2029 |
| | | 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | | |
| - | Peningkatan pemenuhan pelayanan jaringan listrik untuk kebutuhan domestik dan nondomestik; dan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBN | PLN |
| - | Kajian penyusunan masterplan/DED jaringan energi | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBN | PLN |
| 4 | Rencana Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | |
| 4.a | Jaringan Tetap | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan telepon fixed line | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B, Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | TELKOM |
| 4.b | Jaringan Bergerak | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan Jaringan bergerak berupa menara base transceiver station (BTS) | a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; dan c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | TELKOM, Diskominfo |
| - | Peningkatan dan pengembangan layanan internet (Hot Spot Area) | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | TELKOM, Diskominfo |
| - | Kajian penyusunan masterplan jaringan telokomunikasi | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab | TELKOM, Diskominfo |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|--------------|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| 5 | Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air | | | | | | | | | | | | |
| 5.a | Sistem jaringan irigasi | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi dan pemeliharaan: | | | | | | | | | | | | |
| 5.a.1 | - Jaringan irigasi primer - Bangunan pendukung saluran irigasi primer | SWP B Blok 3 Sub-Blok B; Sub-Blok C; Sub-Blok D | | | | | | | | | | APBD Kab, masyarakat | DPU, Dinas Pertanian |
| 5.a.2 | - Jaringan irigasi sekunder - Bangunan pendukung saluran irigasi sekunder | SWP B Blok 3 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C; Sub-Blok D. | | | | | | | | | | APBD Kab, masyarakat | DPU, Dinas Pertanian |
| 5.b | Bangunan sumber daya air | | | | | | | | | | | | |
| - | Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air : - Pintu air | a. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; dan 2) Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E. b. SWP C Blok 2 Sub-Blok B | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Pertanian |
| - | Penyusunan Masterplan Sistem Jaringan Irigasi | Seluruh SWP | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Pertanian |
| 6 | Rencana Jaringan Air Minum | | | | | | | | | | | | |
| 6.a | Unit Air Baku | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku, berupa bangunan pengambil air baku | SWP C Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemempupera, Perumda Air Minum Kab Sragen |
| 6.b | Unit produksi | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemempupera, Perumda Air Minum Kab Sragen |
| 6.c | Unit Distribusi | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi pembagi PDAM | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemempupera, Perumda Air Minum Kab Sragen |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| | | C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | |
| 6.d | Unit Pelayanan | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Hidran umum | a. Hidran umum, terdapat di: 1) SWP A terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; dan b) Blok 2 Sub-Blok A. 2) SWP B terdiri atas: a) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Sub-Blok E; b) Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan c) Blok 3 Sub-Blok A. b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Sub-Blok B; Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Swasta |
| | Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan hidran kebakaran | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Swasta |
| 6.e | Sumur Pompa | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sumur pompa | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok E. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) Blok 2 Sub-Blok B | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, Dinas Pertanian, Swasta |
| - | Peningkatan Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda | Seluruh SWP | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU |
| - | Perencanaan dan pengembangan penyediaan jaringan perpipaan penyedia Perumda dan Lembaga Non Perumda | Seluruh SWP | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU |
| - | Pengurangan tingkat kebocoran jaringan perpipaan air minum | Seluruh SWP | | | | | | | | | | APBD | Perumda Air Minum Kab Sragen |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|------------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| - | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU |
| - | Konservasi sumber air baku | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Perumda Air Minum Kab Sragen, DPU, DISPERKIMTARU |
| - | Kajian penyusunan masterplan jaringan Air Minum | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD Kab Sragen, Swasta | Dinas Pekerjaan Umum, PDAM |
| 7 | Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.a | Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Perencanaan dan pembangunan sub-sistem pengolahan lumpur tinja | SWP B Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | | APBD, swadaya, swasta | DLH, swasta |
| 7.b | Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan kegiatan pengelolaan air limbah terpusat berupa IPAL skala Kawasan Tertentu/Permukiman | SWP C Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | | APBD, swadaya, swasta | DLH, DPU, swasta |
| - | Penyusunan masterplan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD, swadaya, swasta | DLH, DPU, swasta |
| - | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik | SWP B Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH, DPU, Dinkes, masyarakat |
| - | Pembinaan teknik pengelolaan air limbah kepada masyarakat Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH, DPU, Dinkes, masyarakat |
| - | Penyediaan IPAL komunal atau terpusat untuk limbah domestik untuk zona perumahan. | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, DPU, swasta |
| - | Penyediaan IPAL Komunal untuk industri rumah tangga/ kecil atau mikro pada kawasan perumahan. | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, DPU, swasta |
| - | Penyediaan sarana pengolahan limbah B3 fasilitas kesehatan skala perumahan. | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, DPU, swasta |
| 7.c | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, DPU, swasta |
| 8 | Rencana Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.a | Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan dan Pembangunan TPS/TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle) | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 | 2029 |
| | | c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok E; dan 2) Blok 2 Sub-Blok E. | | | | | | | | | | | | |
| 8.b | Tempat Penampungan Sementara (TPS) | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitasi dan peningkatan tempat penampungan sementara (TPS) | a. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan b. SWP C Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |
| 8.c | Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) | SWP B Blok 2 Sub-Blok A | | | | | | | | | | | | |
| - | Sosialisasi dan pelatihan 3R | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |
| - | Penambahan sarana prasarana persampahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |
| - | Pembangunan TPS3R di setiap desa/kelurahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |
| - | Pengembangan bank sampah di setiap desa/kelurahan pada zona perumahan | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, swasta | DLH, Masyarakat, Swasta |
| - | Penyusunan masterplan persampahan | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH |
| 9 | Rencana Jaringan Drainase | | | | | | | | | | | | | |
| 9.a | Jaringan drainase primer | | | | | | | | | | | | | |
| - | Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase primer | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| 9.b | Jaringan drainase sekunder | | | | | | | | | | | | | |
| - | Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Disperkimtaru |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | |
|-----|--|--|-------------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 | PJM-4 | | | PJM-5 | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (2030-2034) | (2035-2039) | | | (2040-2043) | |
| | | Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | | | |
| 9.c | Jaringan drainase tersier | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase tersier | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Disperkimtaru | |
| 9.d | Jaringan drainase lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Peningkatan dan rehabilitasi jaringan drainase lokal | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub- | | | | | | | | | | | | APB Desa, Swasta | Desa, Masyarakat |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|-------------|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | 2029 |
| | | Blok C. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori pada setiap kawasan. | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru |
| - | Pembangunan <i>eco drainage</i> skala lingkungan. | Seluruh SWP | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| 10 | Rencana Jalur Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| 10.a | Jalur Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan jalur evakuasi bencana | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D, Blok 2 Sub-Blok | | | | | | | | | | APBD Kab | BPBD, DPU, Disperkimtaru | |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|------|--|---|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | | | PJM-5 (2040-2043) |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| | | E, Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | | |
| 10.b | Tempat Evakuasi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES) | 1) Komplek Kantor Kelurahan Kwangen pada SWP A Blok 1 Sub-Blok A; 2) Komplek Kantor Kelurahan Ngembatpadas dan Lapangan Kelurahan Ngembatpadas yang pada SWP A Blok 2 Sub-Blok A; 3) Komplek Kantor Desa Genengduwur pada SWP B Blok 1 Sub-Blok B; 4) Komplek Kantor Kelurahan Gemolong pada SWP B Blok 1 Sub-Blok D; 5) Komplek Kantor Desa Peleman pada SWP B Blok 2 Sub-Blok E; 6) Eks Komplek SBI Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok A; 7) Komplek Kantor Kecamatan Gemolong pada SWP C Blok 1 Sub-Blok E; 8) Komplek Kantor Kelurahan Kragilan pada SWP C Blok 1 Sub-Blok F; 9) Komplek Kantor Desa Tegaldowo pada SWP C Blok 2 Sub-Blok F; 10) SD Negeri Jenalas pada SWP B Blok 1 Sub-Blok F; 11) SD Negeri Kalangan pada SWP B Blok 3 Sub-Blok C; dan 12) SD Negeri Nganti pada SWP B Blok 2 Sub-Blok C | | | | | | | | | | APBD Kab | BPBD, DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan | |
| | Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) | Edupark Gemolong dan Lapangan Suci pada SWP B Blok 1 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | BPBD, DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| 10.c | Jalur Sepeda | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Jalur Sepeda | a. SWP A terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2) Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2) Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa Swasta | DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan | |
| 10.d | Jaringan Pejalan Kaki | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki | a. SWP A Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; b. SWP B terdiri atas: 1) Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa Swasta | DPU, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|-----------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| | | dan 2) Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | |
| B. | Perwujudan Rencana Pola Ruang | | | | | | | | | | | | |
| I | Perwujudan Zona Lindung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zona Badan Air | | | | | | | | | | | | |
| - | Perlindungan zona badan air dengan baku mutu air kelas satu | Perlindungan Zona Badan Air seluas 7,85 Ha terdapat di: | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH, DPU PSDA Kab |
| - | Pencadangan zona badan air dan ekosistemnya | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH, DPU PSDA Kab |
| - | Pengendalian perubahan iklim (pengelolaan air limbah) | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A, Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH, DPU PSDA Kab |
| 2 | Zona Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | | | |
| - | Penetapan garis sempadan sungai | Perwujudan Zona Perlindungan sempadan seluas 42,73 Ha terdapat di: | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab |
| - | Penetapan garis sempadan sungai | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab |
| - | Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. b. SWP B terdiri atas : | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU PSDA Kab |
| - | Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai | 1. Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok F; | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab, DLH |
| - | Pengembangan Jalur Inspeksi | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab, DLH |
| - | Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sempadan sungai | 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab |
| - | Normalisasi sungai. | c. SWP C terdiri atas : | | | | | | | | | | APBN, APBD | BBWS Bengawan Solo, PSDA |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | |
|------------|---|---|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | | 2029 |
| | | 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan | | | | | | | | | | | Prov, APBD Kab | Prov Jawa Tengah, DPU Kab |
| - | Penertiban bangunan di jalur sempadan sungai. | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab |
| - | Penanaman pohon penahan erosi di sekitar sungai | | | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD Kab | BBWS Bengawan Solo, PSDA Prov Jawa Tengah, DPU Kab |
| 3 | Zona RTH | | | | | | | | | | | | | |
| 3.a | Sub-zona RTH Taman Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan | Perwujudan Sub-zona RTH taman kecamatan seluas 15,80 Ha di: | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru |
| - | Pemeliharaan Sub-zona RTH Taman Kecamatan | a. SWP A Sub-Blok 2 Sub-blok C; | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru |
| - | Peningkatkan sarana prasarana penunjang dalam pengembangan Sub-zona Taman Kecamatan | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru |
| - | Sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Sub-zona RTH Taman Kecamatan | c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B, Blok 1 Sub-Blok E, Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru |
| - | Pengembangan pariwisata pada taman Edupark Gemolong | SWP B Sub-Blok 1 Sub-blok A | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Disperkimtaru, Disporapar |
| 3.b | Sub-zona RTH Taman Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan | Perwujudan Sub-zona RTH taman kelurahan seluas 8,36 Ha di: | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| - | Perencanaan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan | a. SWP A Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| - | Pembebasan Tanah dalam pengembangan Sub-zona RTH Desa/Kelurahan | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| - | Pembangunan Sub-zona Ruang Terbuka Hijau Taman Desa/Kelurahan | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| - | Pemeliharaan Sub-zona RTH Taman Desa/Kelurahan | 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBD Kab, APB Desa | DPU, DLH, Disperkimtaru, Desa/Kelurahan |
| 3.c | Sub-zona RTH Pemakaman | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan Sub-zona RTH Pemakaman | Perwujudan Sub-zona RTH Pemakaman seluas 11,69 Ha di: | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | Disperkimtaru, DLH, Developer |
| - | Pengembangan Sub-zona RTH Pemakaman | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | | APBD Kab | Disperkimtaru, DLH, Developer |
| - | Pemeliharaan Sub-zona RTH Pemakaman | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swadaya | Disperkimtaru, DLH, Developer |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | |
|-------------|--|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 |
| 2.1 | Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) | | | | | | | | | | | | |
| - | Pemberian insentif kepada petani program pertanian pangan berkelanjutan | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan | | | | | | | | | | APBN, APBD Prov, APBD KAb | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab |
| - | Pengawasan dan pengendalian ahli fungsi lahan pertanian | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Pertanian |
| - | Pengembangan produktivitas pertanian | | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Peningkatan produktivitas pertanian | | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Pengembangan pemasaran, dan promosi hasil pertanian. | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pertanian | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Pertanian |
| - | Pembangunan dan peningkatan bangunan pendukung saluran irigasi | 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. | | | | | | | | | | | |
| - | Perwujudan RTH 10% untuk kawasan terbangun diluar LP2B | c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok FD. | | | | | | | | | | APBD Kab, Swadaya, Swasta | Dinas Pertanian, Masyarakat, Swasta |
| 2.2. | Sub-Zona Hortikultura (P-2) | | | | | | | | | | | | |
| - | Penerapan teknologi budidaya dalam pengembangan pertanian hortikultura secara terpadu | SWP B terdiri atas: a. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim | b. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen | c. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Pengawasan penggunaan pupuk kimia dan penerapan penggunaan pupuk organik | | | | | | | | | | | APBD Kab | Dinas Pertanian |
| - | Perwujudan RTH 10% untuk kawasan terbangun diluar LP2B | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swadaya, Swasta | Dinas Pertanian, Masyarakat, Swasta |
| 3 | Zona Pariwisata | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan wisata secara terpadu dengan objek situs budaya Sangiran | SWP A Blok 1 Sub-Blok C dan SWP B Blok 1 Sub-Blok D. | | | | | | | | | | APBD Kab | Disporapar |
| - | Pengembangan pemasaran, dan promosi wisata | | | | | | | | | | | APBD Kab | Disporapar |
| - | Peningkatan daya tarik dan atraksi wisata | | | | | | | | | | | APBD Kab | Disporapar |
| - | Pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas umum penunjang wisata | | | | | | | | | | | APBD Kab | Disporapar |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 | 2029 |
| | | Sub-Blok C; Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F III. Sub zona kepadatan rendah: a. Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan b. Blok 3 Sub-Blok B; Blok 3 Sub-Blok C, Blok 3 Sub-Blok D. | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan RTH Publik di zona perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah sebesar | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.a | Sub-Zona SPU Skala Kota | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan Administrasi/ Rektorat dan Pendidikan Politeknik Pariwisata | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru |
| - | Pembangunan Sarana Olahraga dan Pendidikan Politeknik Pariwisata | | | | | | | | | | | | APBD Kab, APBN | Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru |
| - | Pembangunan Asrama Mahasiswa Politeknik Pariwisata | b. SWP B Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru |
| - | Pembangunan Rumah Dinas Politeknik Pariwisata | c. SWP C Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok F | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kemenparekraf, DPU, Disperkimtaru |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan | | | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta |
| - | Pengembangan pendidikan sekolah tinggi/ Politeknik bidang kepariwisataan | | | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta |
| - | Pengembangan dan penataan GOR | | | | | | | | | | | | APBD Prov, APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Pendidikan kab/Prov, Disporapar dan swasta |
| - | Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU dan DLH |
| - | Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH |
| - | Pengembangan pengelolaan drainase yang terintegrasi dengan pembuatan sumur resapan | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan pengelolaan sampah dengan konsep 3R | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan ruang parkir | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| - | Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | | |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH, Swasta |
| 5.b | Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; dan | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Pendidikan, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana peribadatan | 2. Blok 2 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana kesehatan | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D, Blok 1 Sub-Blok F; dan | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Kesehatan, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana olahraga | 2. Blok 3 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Disporapar, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana Sosial | c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; dan | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong | 2. Blok 2 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| - | Penyediaan ruang parkir | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, DLH, Swasta |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | | |
| 5.c | Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | | | | | | | | | | | | |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana pendidikan | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok C; dan | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Pendidikan, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana peribadatan | 2. Blok 2 Sub-Blok A; | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana kesehatan | b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok F; | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Dinas Kesehatan, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana olahraga | 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, Disporapar, Kecamatan, swasta |
| - | Penataan dan rehabilitasi sarana Sosial | 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok C. | | | | | | | | | | | |
| - | Penyediaan RTH Publik zona SPU untuk pemenuhan RTH Publik Kecamatan Gemolong | c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU dan DLH |
| - | Pengembangan kegiatan <i>urban farming</i> pada zona SPU | 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| - | Penyediaan ruang parkir | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan dan pembuatan biopori, sumur resapan dan pemanenan air hujan | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pembangunan saluran pembuangan air limbah SPU (sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | APBD Kab, Swasta | DPU, DLH, Swasta |
| 6 | Zona Perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | |
| 6.a | Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala Kota | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan dan penataan pasar | SWP B berada di Blok 1 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|--|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | Perindustrian | | | |
| - | Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | | |
| - | Pembangunan bongkar muat barang | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, | | |
| - | Pembangunan <i>Factory Sharing</i> dan fasilitas pendukungnya | SWP C Blok 1 F | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, DPU, Diskumindag | | |
| - | Penataan lokasi perdagangan dan jasa | SWP C yang berada di Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM | | |
| - | Penataan sistem perparkiran | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM | |
| - | Penataan jalur pedestrian | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM | |
| - | Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM | |
| | Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Pengembangan sumur resapan dan biopori | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Pengendalian pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Pengadaan lahan untuk relokasi aktivitas perdagangan dan jasa di sepanjang rel kereta api pada lokasi rencana pengembangan perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| - | Pengembangan RTH sempadan jalan dengan tanaman yang dapat menyerap polutan dan mengurangi kebisingan | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Pemantauan kualitas udara pada titik-titik strategis di zona perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DLH | |
| - | Penataan dan penyediaan ruang parkir | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU | | |
| 6.b | Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala WP | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan dan penataan pasar | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; b. SWP B terdiri atas: 1. Blok 1 Sub-Blok A, Blok 1 Sub-Blok D; 2. Blok 2 Sub-Blok B; dan 3. Blok 3 Sub-Blok D. c. SWP C terdiri atas: Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| - | Pembangunan bongkar muat barang | | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, |
| - | Penataan lokasi perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Penataan sistem perparkiran | | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Penataan jalur pedestrian | | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 | 2029 |
| - | Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. | 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH | |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan sumur resapan dan biopori. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penataan dan penyediaan ruang parkir. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| - | Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| 6.c | Sub-Zona Perdagangan dan jasa Skala SWP | | | | | | | | | | | | | |
| - | Pembangunan dan penataan pasar | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B. b. SWP B terdiri atas: 1. Blok 1 Sub-Blok A; Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A; Blok 3 Sub-Blok B. c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A; Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok D; Blok 2 Sub-Blok E; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |
| - | Pembangunan bongkar muat barang | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| - | Penataan lokasi perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Penataan sistem perparkiran | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Penataan jalur pedestrian | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| - | Peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UMKM |
| | Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan sampah zona perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penyediaan sarana pengelolaan air limbah zona perdagangan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan SPALDS dengan teknologi biofilter baik aerob maupun anaerob atau lumpur aktif pada bangunan perdagangan dan jasa | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Pengembangan sumur resapan dan biopori | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| - | Penataan dan penyediaan ruang parkir *) | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU |
| - | Penyediaan RTH zona perdagangan dan jasa untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, DLH |
| 7 | Zona Perkantoran | | | | | | | | | | | | | |
| - | Penataan zona perkantoran | a. SWP A terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok A; dan 2. Blok 2 Sub-Blok A b. SWP B terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok C; Blok 2 Sub-Blok E; dan 3. Blok 3 Sub-Blok A c. SWP C terdiri atas : 1. Blok 1 Sub-Blok B; Blok 1 | | | | | | | | | | APBD Kab | Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah | |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH Perkantoran untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | | APBD Kab | Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah |
| - | Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran | | | | | | | | | | | | APBD Kab | Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah |
| - | Pengembangan sumur resapan dan lubang biopori di zona perkantoran | | | | | | | | | | | | APBD Kab | Kecamatan, masing masing instansi/OPD daerah |

| No | Program Prioritas | Lokasi | Waktu Pelaksanaan | | | | | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | | | | |
|----------|--|--|-------------------|------|-------|------|------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | PJM-1 | | PJM-2 | | | | | PJM-3 (2030-2034) | PJM-4 (2035-2039) | PJM-5 (2040-2043) | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | 2028 |
| | | Sub-Blok C; Blok 1 Sub-Blok D; Blok 1 Sub-Blok E; Blok 1 Sub-Blok F; dan 2. Blok 2 Sub-Blok B; Blok 2 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | | |
| 8 | Zona Transportasi | | | | | | | | | | | | |
| - | Pengembangan terminal yang terintegrasi dan terpadu | SWP A Blok 1 Sub-Blok A; SWP B Blok 1 Sub-Blok A; dan SWP C Blok 1 Sub-Blok F. | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bina Marga, Dishub |
| - | Penataan kondisi kawasan sekitar terminal | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bina Marga, Dishub |
| - | Pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan halte sebagai saran pendukung transportasi | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bina Marga, Dishub |
| - | Revitalisasi stasiun penumpang Stasiun Kereta Api Salem | | | | | | | | | | | APBN | Kemenhub, PT.KAI |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH zona transportasi untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | APBD Kab | DPU, Bina Marga, Dishub, DLH |
| 9 | Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| - | Penataan zona pertahanan dan keamanan (hankam) | SWP B Blok 1 Sub-Blok D dan SWP C Blok 1 Sub-Blok A. | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kepolisian/TNI |
| - | Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan. | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kepolisian/TNI |
| - | Pengembangan dan penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. | | | | | | | | | | | APBN, APBD Kab | Kepolisian/TNI |

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

MATRIKS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|--------------------|---------------|--|---------------|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepadatan Tinggi | Kepadatan Sedang | Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| PERUMAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 001 | Rumah Tunggal Mewah | 410/ 681 | 4101/ 6811 | 41011/ 68111 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 2 | 002 | Rumah Tunggal Menengah | 410/ 681 | 4101/ 6811 | 41011/ 68111 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 3 | 003 | Rumah Tunggal Sederhana | 410/ 681 | 4101/ 6811 | 41011/ 68111 | X | T2 | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 4 | 004 | Perumahan Umum/ Real Estat Besar | 681 | 6811 | 68110 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 5 | 005 | Perumahan Umum/ Real Estat Sedang | 681 | 6811 | 68110 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 6 | 006 | Perumahan Umum/ Real Estat Kecil | 681 | 6811 | 68110 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 7 | 007 | Real Estat | 681 | 6813 | 68130 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 8 | 008 | Rumah Deret | 410/ 681 | 4101/ 6811 | 41011/ 68111 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 9 | 009 | Rumah Kopel | 410/ 681 | 4101/ 6811 | 41011/ 68111 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | B1,B2 | |
| 10 | 010 | Rumah Petak | 411 | 4102 | 41012 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | T2 | X | B1,B2 | |
| 11 | 011 | Panti | 871 | 8710 | 87100 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 12 | 012 | Rumah Adat | 410 | 4101 | 41011 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 13 | 013 | Rumah sewa/Kost | 559 | 5590 | 55900 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | X | |
| 14 | 014 | Rumah Susun | 551 | 5519 | 55195 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | T2 | X | B1,B2 | |
| 15 | 015 | Asrama | 551 | 5519 | 55199 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | T2 | X | B1,B2 | |
| 16 | 016 | Rumah Dinas | 410 | 4101 | 41011 | X | T2 | X | X | X | X | X | B1 | T2 | B1 | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | I | B1 | B1 | |
| PERKANTORAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 017 | Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Nasional | 841/ 842/ 843 | 8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430 | 84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/ 84233/ 84234/ 84300 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | I | I | I | I | B1,B2 | I | |
| 18 | 018 | Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Provinsi | 841/ 842/ 843 | 8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430 | 84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/ 84233/ 84234/ 84300 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | I | I | I | I | B1,B2 | I | |
| 19 | 019 | Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota | 841/ 842/ 843 | 8411/ 8412/ 8413/ 8421/ 8422/ 8423/ 8430 | 84111/ 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84119/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84129/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84210/ 84221/ 84222/ 84223/ 84224/ 84231/ 84232/ 84233/ 84234/ 84300 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | I | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|----|---------------|---|-------------------------|---|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| | | | | | 84233/ 84234/ 84300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 020 | Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan | 841 | 8411 | 84119 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| 21 | 021 | Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kelurahan | 841 | 8411 | 84119 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| 22 | 022 | Kantor Swasta Skala Pelayanan Nasional | 702/ 410/ 821/842 | 7020/ 4101/ 8211/8423 | 41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| 23 | 023 | Kantor Swasta Skala Pelayanan Provinsi | 702/ 410/ 821/842 | 7020/ 4101/ 8211/8423 | 41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| 24 | 024 | Kantor Swasta Skala Pelayanan Kota | 702/ 410/ 821/842 | 7020/ 4101/ 8211/8423 | 41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1, B2 | B1, B2 | |
| 25 | 025 | Kantor Swasta Skala Pelayanan Kecamatan | 702/ 410/ 821/842 | 7020/ 4101/ 8211/8423 | 41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| 26 | 026 | Kantor Swasta Skala Pelayanan Kelurahan | 702/ 410/ 821/842 | 7020/ 4101/ 8211/8423 | 41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/ 70203/ 70204/ 70209/82110/84231 | X | X | T2 | T2 | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1,B2, B4 | B1,B2, B4 | |
| | | PERDAGANGAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 027 | Mall / Plaza | 469 | 4690 | 46900 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | X | X | X | I | I | I | B1 | X | X | |
| 28 | 028 | Supermarket | 471 | 4711 | 47111 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | X | X | X | I | I | I | B1 | X | X | |
| 29 | 029 | Mini Market | 471 | 4711 | 47111 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1 | B1 | B1 | I | I | I | B1 | X | X | |
| 30 | 030 | Showroom Mobil | 451 | 4510 | 45101/ 45102/ 45103/ 45104 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 31 | 031 | Showroom Motor | 454 | 4540 | 45401/ 45402/ 45403/ 45404/45405/45406/45407 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 32 | 032 | Grosir | 469/ 463/ 464/ 465/ 479 | 4690/ 4631/ 4632/ 4633/ 4641/ 4642/ 4643/ 4644/ 4649/ 4651/ 4652/ 4653/4659/ 4791/ 4792/ 4799 | 46900/ 46311/ 46312/ 46313/ 46314/ 46315/ 46319/ 46321/ 46322/ 46323/ 46324/ 46325/ 46326/ 46327/ 46329/ 46331/ 46332/ 46333/ 46334/ 46335/ 46339/ 46411/ 46412/ 46413/ 46414/ 46419/ 46421/ 46422/ 46430/ 46441/ 46442/ 46443/ 46444/ 46445/ 46446/ 46447/ 46448/ 46491/ 46492/ 46493/ 46494/ 46495/ 46499/ 46511/ 46512/ 46521/ 46522/ 46523/ 46530/ 46591/ 46592/ 46593/ 46594/ 46599/ 47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/ | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | B1,B2, B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
|----|---------------|--------------------------------|--------------|--|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepadatan Tinggi | Kepadatan Sedang | Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | | |
| | | | | | 47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 033 | Pertokoan | 471 | 471/ 472/ 475/ 476/ 477 | 47112/ 47192/ 47211/ 47212/ 47213/ 47214/ 47215/ 47216/ 47219/ 47221/ 47222/ 47230/ 47241/ 47242/ 47243/ 47244/ 47245/ 47249/ 47591/ 47592/ 47593/47594/ 47595/ 47596/ 47597/ 47599/ 47611/ 47612/ 47620/ 47630/ 47640/ 47650/47711/47712/ 47713/47714 /47722/47723/47724/ 47725/47726/47727/ 47728/ 47729 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | T2 | B1,B5 | X | | |
| 34 | 034 | Toko | 471 | 4711 | 47112 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | B5 | B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | T2 | B1,B5 | X | | |
| 35 | 035 | Kios | 471 | 4711 | 47112 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | T2 | B1,B5 | X | | |
| 36 | 036 | Warung | 471 | 4711 | 47112 | X | X | T1 | T1 | T1 | T1 | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | T2 | B1,B5 | B1,B5 | | |
| 37 | 037 | Pasar Tradisional Eceran | 478 | 4781/ 4782/ 4783/ 4784/ 4785/ 4786/ 4787/ 4788/ 4789 | 47811/ 47812/ 47813/ 47814/ 47815/ 47816/ 47819/ 47821/ 47822/ 47823/ 47824/ 47825/ 47826/ 47827/ 47828/ 47829/ 47831/ 47832/ 47833/ 47834/ 47841/ 47842/ 47843/ 47844/ 47845/ 47846/ 47849/ 47851/ 47852/ 47853/ 47854/ 47855/ 47859/ 47861/ 47862/ 47863/ 47864/ 47865/ 47866/ 47867/ 47869/ 47871/ 47872/ 47873/ 47874/ 47875/ 47876/ 47877/ 47879/ 47881/ 47882/ 47883/ 47891/ 47892/ 47893/ 47894/ 47895/ 47896/ 47897/ 47899 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | B1 | I | X | | |
| 38 | 038 | Pasar Tradisional Bukan Eceran | 479 | 4791/4792/4799 | 47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/ 47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | X | I | X | | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|----|---------------|---------------------------------------|---------------|--|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 39 | 039 | Pedagang Sektor Informal Eceran | 478 | 4781/ 4782/ 4783/ 4784/ 4785/ 4786/ 4787/ 4788/ 4789 | 47811/ 47812/ 47813/ 47814/ 47815/ 47816/ 47819/ 47821/ 47822/ 47823/ 47824/ 47825/ 47826/ 47827/ 47828/ 47829/ 47831/ 47832/ 47833/ 47834/ 47841/ 47842/ 47843/ 47844/ 47845/ 47846/ 47849/ 47851/ 47852/ 47853/ 47854/ 47855/ 47859/ 47861/ 47862/ 47863/ 47864/ 47865/ 47866/ 47867/ 47869/ 47871/ 47872/ 47873/ 47874/ 47875/ 47876/ 47877/ 47879/ 47881/ 47882/ 47883/ 47891/ 47892/ 47893/ 47894/ 47895/ 47896/ 47897/ 47899 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | T2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | I | I | I | B1 | B1 | X | | |
| 40 | 040 | Pedagang Sektor Informal Bukan Eceran | 479 | 4791/4792/4799 | 47911/ 47912/ 47913/ 47914/ 47919/ 47920/ 47991/ 47992/ 47993/ 47994/ 47995/ 47996/ 47997/ 47998/ 47999 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | T2 | B1 | B5 | B5 | B5 | B1 | B1 | B1 | I | I | I | B1 | B1 | X | |
| 41 | 041 | Bahan Bangunan | 466/ 475 | 4663/ 4752 | 46631/ 46632/ 46633/ 46634/ 46635/ 46636/ 46637/ 46698/ 46639/ 47521/ 47522/ 47523/ 47524/ 47525/ 47526/ 47527/ 47528/ 47529 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B5 | B5 | B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 42 | 042 | Rumah Makan | 561/ 562/ 563 | 5610/ 5621/ 5630 | 56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | X | B1,B5 | X | |
| 43 | 043 | Café | 561/ 562/ 563 | 5610/ 5621/ 5630 | 56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | X | B1,B5 | X | |
| 44 | 044 | Pusat Jajan | 561/ 562/ 563 | 5610/ 5621/ 5630 | 56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | B1 | B1,B5 | X | |
| 45 | 045 | Bakery | 561/ 562/ 563 | 5610/ 5621/ 5630 | 56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | X | X | I | I | I | X | B1,B5 | X | |
| 46 | 046 | Catering/Jasa Boga | 561/ 562/ 563 | 5610/ 5621/ 5630 | 56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56303/ 56304/ 56305/ 56306 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B5 | B5 | B5 | I | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 47 | 047 | Hotel | 559 | 5590 | 55900 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | X | X | I | I | I | B1 | X | X | |
| 48 | 048 | Losmen/Wisma | 559 | 5590 | 55191/ 55192/ 55193/ 55194/ 55199 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 49 | 049 | Cottage | 551 | 5519 | 55199 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 50 | 050 | Home Stay | 551 | 5519 | 55199 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 51 | 051 | Resort | 551 | 5519 | 55199 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 52 | 052 | Bioskop | 591 | 5914 | 59140 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 53 | 053 | Karaoke | 932 | 9329 | 93292 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B3,B5 | B1,B2,B3,B5 | B1,B2,B3,B5 | X | X | X | B1,B2,B3,B5 | B1,B2,B3,B5 | B1,B2,B3,B5 | X | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|----|---------------|-----------------------|---|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 54 | 054 | Permainan Ketangkasan | 932 | 9329 | 93293 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 55 | 055 | Game Center | 932 | 9329 | 93299 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 56 | 056 | Kolam Renang | 931 | 9311 | 93114 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 57 | 057 | Kolam Pancing | 932 | 9323 | 93233 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 58 | 058 | Teater Terbuka | 900 | 9000 | 90009 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 59 | 059 | Taman hiburan | 900 | 9000 | 90009 | X | X | I | I | X | B1 | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 60 | 060 | Taman perkemahan | 551 | 5519 | 55192 | X | X | I | I | X | B1 | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | B1,B2,B5 | X | X | |
| 61 | 061 | Waterpark | 931 | 9311 | 93114 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 62 | 062 | Bank | 641/ 642/ 643/ 644/ 645/ 649/ 651/ 652/ 653/ 661/ 662/ 663/ 664 | 6412/ 6413/ 6414/ 6415/ 6419/ 6420/ 6430/ 6440/ 6450/ 6491/ 6492/ 6493/ 6494/ 6495/ 6499/ 6511/ 6512/ 6513/ 6521/ 6522/ 6531/ 6532/ 6611/ 6612/ 6613/ 6614/ 6615/ 6616/ 6617/ 6619/ 6621/ 6622/ 6629/ 6631/ 6632/ 6639/ 6641/ 6642 | 64121/ 64122/ 64123/ 64131/ 64132/ 64141/ 64142/ 64143/ 64144/ 64145/ 64146/ 64147/ 64148/ 64151/ 64152/ 64190/ 64200/ 64300/ 64400/ 64500/ 64911/ 64912/ 64913/ 64921/ 64922/ 64923/ 64931/ 64932/ 64933/ 64941/ 64942/ 64943/ 64951/ 64952/ 64953/ 64991/ 64992/ 64999/ 65111/ 65112/ 65113/ 65121/ 65122/ 65123/ 65131/ 65321/ 65133/ 65211/ 65212/ 65213/ 65221/ 65222/ 65311/ 65312/ 65313/ 65321/ 65322/ 66111/ 66112/ 66113/ 66114/ 66115/ 66116/ 66117/ 66118/ 66119/ 66121/ 66122/ 66123/ 66124/ 66131/ 66132/ 66139/ 66141/ 66142/ 66143/ 66144/ 66145/ 66146/ 66147/ 66149/ 66151/66160/66171/66190/66211/ 66212/ 66221/ 66222/ 66223/ 66224/ 66225/ 66226/ 66291/ 66292/ 66299/ 66311/ 66312/ 66321/ 66322/ 66390/ 66411/ 66412/ 66413/ 66420 | X | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 |
| 63 | 063 | Koperasi | 641 | 6412/ 6413/ 6414/ 6415/ 6419 | 64121/ 64122/ 64123/ 64131/ 64132/ 64141/ 64142/ 64143/ 64144/ 64145/ 64146/ 64147/ 64148/ 64151/ 64152/ 64190 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | |
| 64 | 064 | Money Changer | 661 | 6612 | 66126 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | |
| 65 | 065 | ATM | 641 | 6419 | 64190 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B2, B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | |
| 66 | 066 | Pegadaian | 649 | 6492 | 64921 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | |
| 67 | 067 | Asuransi | 651 | 6511/6512/6513 | 65111/ 65112/ 65113/ 65121/ 65122/ 65123/ 65131/ 65132/ 65133 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|-----|---------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 68 | 068 | Sewa Guna Usaha (Leasing) | 649 | 6491 | 64910 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | |
| 69 | 069 | Kantor Pos | 531 | 5310 | 53101 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 70 | 070 | Ekspedisi/Jasa Pengiriman | 531 | 5310 | 53103 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 71 | 071 | Cargo | 522 | 5224 | 52240 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 72 | 072 | Televisi | 602 | 6020 | 60201/ 60202 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 73 | 073 | Radio | 601 | 6010 | 60101/ 60102 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 74 | 074 | Jasa IT | 619 | 6192 | 61921/61922/61923/61924/61929 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 75 | 075 | Bengkel Mobil | 452/ 454 | 4520/ 4540 | 45201/ 45202/ 45407 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 76 | 076 | Bengkel Suku Cadang dan Aksesoris Mobil | 453 | 4530 | 45301/ 45302 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 77 | 077 | Bengkel Reparasi dan Perawatan | 454 | 4540 | 45405/ 45406 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 78 | 078 | Salon Mobil | 452 | 4520 | 45201/ 45202 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 79 | 079 | Cucian Mobil & Motor | 452 | 4520 | 45201/ 45202 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 80 | 080 | Bengkel Sepeda Motor | 454 | 4540 | 45407 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 81 | 081 | Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor | 465 | 4659 | 46593 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 82 | 082 | Bengkel Las | 477 | 4779 | 47793 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 83 | 083 | Bengkel Elektronik | 477 | 4779 | 47793 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 84 | 084 | Bengkel Meubel/Furniture | 477 | 4779 | 47793 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 85 | 085 | Bengkel Alat Berat | 477 | 4779 | 47793 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | I | I | I | I | B1,B5 | X |
| 86 | 086 | Kursus Keterampilan | 854 | 8549 | 85499 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| 87 | 087 | Penitipan Anak | 851 | 8513 | 85134 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| 88 | 088 | Penitipan Hewan | 016 | 0162 | 1621/01622/01623/01629 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| 89 | 089 | Penitipan Kendaraan | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| 90 | 090 | Penitipan Barang | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X |
| 91 | 091 | Air Minum Isi Ulang | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 92 | 092 | Jasa Pemasaran Property | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 93 | 093 | Jasa Hukum | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 94 | 094 | Jasa Konstruksi dan Konsultansi | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 95 | 095 | Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 96 | 096 | Jasa Tukang Jahit | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 97 | 097 | Laundry | 811 | 8110 | 81100 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 98 | 098 | Studio Foto | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 99 | 099 | Foto Copy | 464 | 4642 | 46422 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 100 | 100 | Percetakan | 464 | 4642 | 46422 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | B1 | B1 | B1 | I | I | I | I | X | X | |
| 101 | 101 | Advertaising | 464 | 4642 | 46422 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | I | X | X | |
| 102 | 102 | SPBU | 473 | 4730 | 47301 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | X | X | X | I | I | I | I | B1,B2,B5 | X | |
| 103 | 103 | Sablon & Stempel | 329 | 3290 | 32901 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | X | X | X | |
| 104 | 104 | Sewa Tenda, Pelaminan dan Karangan Bunga | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | I | X | X | |
| 105 | 105 | Butik / Factory Outlet | 477 | 4771 | 47711 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | | | | | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 | Salon/Barber Shop | 961 | 9611 | 96111 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B5 | B5 | B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| 107 | 107 | Pijat | 961 | 9612 | 96121 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B5 | B5 | B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| 108 | 108 | Mandi Uap/Sauna dan Spa | 961 | 9612 | 96122 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| 109 | 109 | Pusat Kebungaran/Fitnes | 961 | 9612 | 96129 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B5 | B5 | B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| 110 | 110 | Pengobatan Alternatif | 969 | 9699 | 96999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B5 | B5 | B5 | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| 111 | 111 | Tanaman Hias | 969 | | 96910 | X | T2 | B1 | B1 | X | B1 | X | B1,B2,B5 | T2 | I | I | I | I | X | X | X | I | I | I | I | X | X | | | | | |
| INDUSTRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 112 | Industri pengolahan dan pengawetan daging | 101 | 1011 | 10110 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 113 | 113 | Industri Pengolahan dan Pengawetan buah - buahan dan sayuran | 103 | 1031/1032/1033/1039 | 10130/ 10311 / 10312 /10313/ 10314/ 10320/10330/10391 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 114 | 114 | Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani | 104 | 1041/1042/1043/1049 | 10411/10412/10413/ 10414/10415/10421/ 10422/ 10423/10424/ 10431/10432 / 10433 / 10434/ 10435 / 10436 / 10437 / 10490 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 115 | 115 | Industri penggilingan padi - padian, tepung dan pati | 106 | 1061/1062/1063 | 10611 / 10612 / 10613 / 10614 / 10615 /10616 / 10621 / 10622 / 10623 / 10629 /10631 / 10632 / 10633 / 10634 / 10635 / 10636 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 116 | 116 | Industri makanan lainnya | 107 | 1071/1072/1073/1074/1075 /1076/1077 | 10710 / 10721 / 10722 / 10723 / 10729 / 10731 / 10732 / 10733 / 10734 / 10739 / 10740 / 10750 / 10761 / 10762 / 10763 / 10771 / 10772 / 10773 / 10774 / 10779 / 10791 / 10792 / 10793 / 10794 / 10795 / 10796 / 10799 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 117 | 117 | Industri Minuman Ringan | 110 | 1104 | 11040 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 118 | 118 | Industri Air Minum dan Air Mineral | 110 | 1105 | 11050 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 119 | 119 | Industri Minuman Lainnya | 110 | 1109 | 11090 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |
| 120 | 120 | Industri Persiapan Serat Tekstil | 131/ 139/ 203 | 1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030 | 13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 121 | 121 | Industri Pemintalan Benang | 131/ 139/ 203 | 1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030 | 13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | | | | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkartoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|-----|---------------|---|---------------|--|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkartoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| | | | | | 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 122 | Industri Pemintalan Benang Jahit | 131/ 139/ 203 | 1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030 | 13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 123 | 123 | Industri Pertenunan Tekstil | 131 | 1311/ 1312/ 1313/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/ 1394/ 1399/ 2030 | 13111/ 13112/ 13113/ 13121/ 13123/ 13131/ 13132/ 13133/ 13134/ 13911/ 13912/ 13913/ 13922/ 13923/ 13924/ 13925/ 13926/ 13929/ 13930/ 13941/ 13942/ 13991/ 13992/ 13993/ 13994/ 13995/ 13996/ 13999/ 20301/ 20302 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 124 | 124 | Industri Kain Tenun Ikat | 131 | 1312 | 13122 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 125 | 125 | Industri Bulu Tiruan Tenunan | 131 | 1312 | 13123 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 126 | 126 | Industri Penyempurnaan Benang | 131 | 1313 | 13131 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 127 | 127 | Industri Penyempurnaan Kain | 131 | 1313 | 13132 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 128 | 128 | Industri Percetakan Kain | 131 | 1313 | 13133 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 129 | 129 | Industri Batik | 131 | 1313 | 13134 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 130 | 130 | Industri Kain Rajutan | 139 | 1391 | 13911 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 131 | 131 | Industri Kain Sulaman | 139 | 1391 | 13912 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 132 | 132 | Industri Bulu Tiruan Rajutan | 139 | 1391 | 13913 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 133 | 133 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga | 139 | 1392 | 13921 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 134 | 134 | Industri Barang Jadi tekstil Sulaman | 139 | 1392 | 13922 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 135 | 135 | Industri Bantal dan Sejenisnya | 139 | 1392 | 13923 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |
| 136 | 136 | Industri Barang jadi Rajut dan Sulaman | 139 | 1392 | 13924 | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|-----|---------------|--|--------------------|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 137 | 137 | Industri Karung Goni | 139 | 1392 | 13925 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 138 | 138 | Industri Karung Bukan Goni | 139 | 1392 | 13926 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 139 | 139 | Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya | 139 | 1392 | 13929 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 140 | 140 | Industri Karpet dan Permadani | 139 | 1393 | 13930 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 141 | 141 | Industri Tali | 139 | 1394 | 13941 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 142 | 142 | Industri Barang Dari Tali | 139 | 1394 | 13942 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 143 | 143 | Industri Kain Pita | 139 | 1399 | 13991 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 144 | 144 | Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri | 139 | 1399 | 13992 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 145 | 145 | Industri Bukan Tenunan | 139 | 1399 | 13993 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 146 | 146 | Industri Kain Ban | 139 | 1399 | 13994 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 147 | 147 | Industri Kapuk | 139 | 1399 | 13995 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 148 | 148 | Industri Tekstil Lainnya | 139 | 1399 | 13999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 149 | 149 | Industri Pakaian Jadi dan Barang Bukan Dari kulit berbulu | 141/ 142/ 143 | '1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430 | 14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 150 | 150 | Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapan, Dari kulit berbulu | 141/ 142/ 143 | '1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430 | 14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 151 | 151 | Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman | 141/ 142/ 143 | '1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430 | 14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 152 | 152 | Industri Kulit, Barang dari kulit dan alas kaki | 151 | 1511/ 1512 | 15111/ 15112/ 15113/ 15114/ 15121/ 15122/ 15123/ 15129 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 153 | 153 | Industri penggergajian dan pengawetan kayu | 161/ 162/ 282/ 310 | 1610/ 1621/ 1622/ 1623/ 1629/ 2822/ 3100 | 16101/ 16102/ 16103/ 16104/ 16105/ 16211/ 16212/ 16213/ 16214/ 16215/ 16221/ 16222/ 16230/ 16291/ 16292/ 16293/ 16294/ 16295/ 16299/ 28222/ 31001/ 31002/ 31009 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 154 | 154 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas | 201/ 202 | 2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029 | 17011/ 17012/ 17013/ 17014/ 17019/ 17021/ 17022/ 17091 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|-----|---------------|---|--------------|--|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 155 | 155 | Industri Kimia Dasar Organik dari hasil pertanian | 201/ 202 | 2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029 | 20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20121/ 20122/ 20123/ 20124/ 20125/ 20126/ 20127/ 20128/ 20129/ 20131/ 20211/ 20212/ 20213/ 20214/ 20221/ 20222/ 20223/ 20231/ 20232/ 20233/ 20234/ 20291/ 20292/ 20293/ 20294/ 20295/ 20296/ 20299 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 156 | 156 | Industri Kimia Dasar Organik lainnya | 201 | 2011 | 20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20121/ 20122/ 20123/ 20124/ 20125/ 20126/ 20127/ 20128/ 20129/ 20131/ 20211/ 20212/ 20213/ 20214/ 20221/ 20222/ 20223/ 20231/ 20232/ 20233/ 20234/ 20291/ 20292/ 20293/ 20294/ 20295/ 20296/ 20299 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 157 | 157 | Industri Pupuk Alam | 201 | 2012 | 20121 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 158 | 158 | Industri Pupuk Buatan Tunggal | 201 | 2012 | 20122 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 159 | 159 | Industri Pupuk Buatan Majemuk | 201 | 2012 | 20123 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 160 | 160 | Industri Pupuk Campuran | 201 | 2012 | 20124 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 161 | 161 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | 201 | 2012 | 20125 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 162 | 162 | Industri Pupuk Hara Mikro | 201 | 2012 | 20126 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 163 | 163 | Industri Pupuk Perlekap | 201 | 2012 | 20127 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 164 | 164 | Industri Media Tanam | 201 | 2012 | 20128 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 165 | 165 | Industri Pupuk Lainnya | 201 | 2012 | 20129 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 166 | 166 | Industri Damar buatan dan bahan baku plastik | 201 | 2013 | 20131 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 167 | 167 | Industri Bahan Baku Pemberantas Hama | 202 | 2021 | 20211 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 168 | 168 | Industri Pemberantas Hama | 202 | 2021 | 20212 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 169 | 169 | Industri Zat Pengatur Tumbuh | 202 | 2021 | 20213 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 170 | 170 | Industri Pestisida | 202 | 2021 | 20214 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 171 | 171 | Industri Bahan Farmasi | 210 | 2101 | 21011 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 172 | 172 | Industri Produk Farmasi untuk manusia | 210 | 2101 | 21012 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 173 | 173 | Industri Produk Farmasi untuk hewan | 210 | 2101 | 21013 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 174 | 174 | Industri Bahan baku obat tradisional | 210 | 2102 | 21021 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|------------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 195 | 195 | industri alat olahraga | 323 | 3230 | 32300 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 196 | 196 | industri alat permainan dan mainan anak - anak | 324 | 3240 | 32401/ 32402 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| 197 | 197 | industri pengolahan lainnya | 329 | 3290 | 32901/ 32902/ 32903/ 32904/ 32905/ 32906/ 32907/ 32909 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | B1,B2,B4,B5 | X | X | X | |
| SARANA PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 198 | Pra Sekolah/PAUD | 851 | 8513/ 8514/ 8516 | 85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/85142/ 85139/85161 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | I | T2,B1,B2 | B1 | |
| 199 | 199 | TK | 851 | 8513/ 8514/ 8516 | 85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/85142/ 85139/85161 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | I | T2,B1,B2 | B1 | |
| 200 | 200 | SD/MI | 851 | 8511/ 8512/ 8516 | 85111/ 85121/ 85162 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | I | T2,B1,B2 | B1 | |
| 201 | 201 | SLTP/MTS | 851 | 8511/ 8512/ 8516 | 85112/ 85122/ 85163 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2,B5 | T2,B1,B2 | X | |
| 202 | 202 | SMU/MA/SMK | 852 | 8521/ 8522/ 8523/ 8524/ 8525/ 8527 | 85210/ 85220/ 85230/ 85240/ 85251/ 85252/ 85270 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2,B5 | T2,B1,B2 | X | |
| 203 | 203 | Akademi/Perguruan Tinggi | 853 | 8531/ 8532/ 8533 | 85311/ 85312/ 85321/ 85322/ 85331/ 85332 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2,B5 | T2,B1,B2 | X | |
| 204 | 204 | Pendidikan Non Formal | 851/ 852/ 853/ 854/855 | 8515/ 8526/ 8534/ 8545/ 8550 | 85151/ 85152/ 85153/ 85154/ 85155/ 85261/ 85262/ 85263/ 85340/ 85451/ 85452/ 85459/ 85500 | X | X | I | I | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2,B5 | T2,B1,B2 | X | |
| 205 | 205 | Rumah Sakit | 861 | 8610 | 86101/ 86103/ 86109 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | B1 | |
| 206 | 206 | Puskesmas | 861 | 8610 | 86102 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 207 | 207 | Puskesmas Pembantu | 861 | 8610 | 86102 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 208 | 208 | Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik | 410/861 | 4101/8610 | 41015/86104/ 86105 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B4,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 209 | 209 | Posyandu | 869 | 8690 | 86901 | X | X | X | X | X | X | X | B1 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 210 | 210 | Praktek Dokter | 862 | 8620 | 86201 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 211 | 211 | Praktek Bidan | 862 | 8690 | 86901 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | I | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 212 | 212 | Apotek / Toko Obat | 477 | 4772 | 47722 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 213 | 213 | Optik | 464 | 4643 | 46430 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 214 | 214 | Laboratorium Kesehatan | 862 | 8690 | 86903 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | B1 | |
| 215 | 215 | Rumah Tunggu Peralinan | 861 | 8610 | 86104/ 86105 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | I | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| 216 | 216 | Area bermain / Play Ground | 931 | 9311 | 93210 | X | I | I | I | X | B1 | X | B1,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | |
| 217 | 217 | Lapangan Olahraga | 931 | 9311 | 93112/ 93113/ 93114/ 93115/ 93119 | X | B1,B2 | I | I | X | X | X | B1,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | |
| 218 | 218 | Gedung Olahraga | 931 | 9311 | 93119 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | I | X | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | T2 | T2 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1 | X | B1,B2,B5 | |
| 219 | 219 | Stadion | 931 | 9311 | 93119 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | I | X | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | T2 | T2 | T2 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1 | X | B1,B2,B5 | |
| 220 | 220 | Masjid | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 221 | 221 | Musholla / Surau | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 222 | 222 | Gereja | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 223 | 223 | Pura | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 224 | 224 | vihara | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |
| 225 | 225 | Klenteng | 949 | 9491 | 94910 | X | X | B1 | B1 | X | X | X | B1,B5 | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | B1 | B1 | B1 | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | | | | |
| 226 | 226 | Gedung Pertemuan Lingkungan | 949 | 9491 | 94910 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | | |
| 227 | 227 | Gedung Pertemuan Kecamatan | 889 | 8890 | 88901 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | | |
| 228 | 228 | Gedung Pertemuan Kota | 889 | 8890 | 88901 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | | |
| 229 | 229 | Lembaga Sosial/Organisasi Masyarakat | 949 | 9499 | 94990 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | | |
| 230 | 230 | Museum | 910 | 9102 | 91021 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | X | X | |
| 231 | 231 | Studio Keterampilan | 855 | 8550 | 85500 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B5 | T2 | X | B2,B5 | B2,B5 | B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | X | X | |
| TRANSPORTASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 232 | Terminal Penumpang | 522/ 492/ 494 | 5221/ 4921/ 4922/ 4941/ 4942/ 4943 | 52211/ 49211/ 49212/ 49213/ 49214/ 49215/ 49216/ 49219/ 49221/ 49229/ 49411/ 49412/ 49413/ 49414/ 49415/ 49419/ 49421/ 49422/ 49423/ 49424/ 49425/ 49426/ 49429/ 49431/ 49432/ 49433 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | X | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | X | |
| 233 | 233 | Lapangan parkir | 522 | 5221 | 52214/ 52215 | X | B1,B2,B5 | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 234 | 234 | Gedung Parkir | 522 | 5221 | 52219 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 235 | 235 | Halte | 522 | 5221 | 52219 | X | I | I | I | X | I | B1 | B1 | T2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | |
| 236 | 236 | Pool Bus | 522 | 5221 | 52219 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 237 | 237 | Pool Angkutan Kota | 522 | 5221 | 52219 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 238 | 238 | Pool Travel | 522 | 5221 | 52219 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 239 | 239 | Stasiun | 522/ 491/ 494 | 5221/ 4911/ 4912/ 4944/ 4945 | 52212/ 49110/ 49120/ 49441/ 49442/ 49450 | X | X | X | X | X | B1,B2,B5 | X | B1,B2,B5 | T2 | I | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | B1,B2,B5 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| ZONA LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 240 | TPS3R | 382 | 3821 | 38211 | X | B1,B2 | B1 | B1 | B1 | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 241 | 241 | TPS | 381/382 | 3811/3821 | 38110/38211 | X | B1,B2 | B1 | B1 | B1 | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 242 | 242 | Transfer Depo | 382 | 3821 | 38211 | X | B1,B2 | B1 | B1 | B1 | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 243 | 243 | Daur Ulang Sampah | 382 | 3821 | 38211/ 38212 | X | B1,B2 | B1 | B1 | B1 | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 244 | 244 | Rumah Kompos | 382 | 3821 | 38212 | X | B1,B2 | B1 | B1 | B1 | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 245 | 245 | Pembangkit listrik tenaga sampah | 383 | 3830 | 39000 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X |
| 246 | 246 | Penimbunan Barang Bekas | 381 | 3811 | 38110 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2 | I | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X |
| 247 | 247 | IPAL | 370 | 3701 | 37011 | X | B1,B2 | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 248 | 248 | IPLT | 370 | 3702 | 37021 | X | B1,B2 | I | B1,B2 | X | X | X | B1,B2 | I | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 |
| 249 | 249 | Pengolahan Limbah B3 | 370 | 3702 | 37022 | X | X | B1,B2 | X | X | X | X | B1,B2 | B1 | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X | |
| 250 | 250 | Fire Hidrant | 842 | 8423 | 84234 | X | I | I | I | I | I | I | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 251 | 251 | Reservoir Pemadam Kebakaran | 842 | 8423 | 84234 | X | T3 | I | I | X | I | B1 | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | B1 | |
| 252 | 252 | Reservoir | 360 | 3600 | 36002 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | B1,B2 | I | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | |
| 253 | 253 | Intake | 361 | 3601 | 36003 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | B1,B2 | I | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | |
| 254 | 254 | Rumah Pompa | 360 | 3600 | 36003 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | B1,B2 | I | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | X | X | X | |

| ID | Kode Kegiatan | Kegiatan/ Zona | Kode KBLI | | | Zona Badan Air | Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau | | | | Zona Badan Jalan | Zona Pertanian | | Zona Pariwisata | Zona Perumahan | | | Zona Sarana Pelayanan Umum | | | Zona Perdagangan dan Jasa | | | Zona Perkantoran | Zona Transportasi | Zona Pertahanan dan Keamanan | |
|---------------------|---------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---|
| | | | KBLI 3 Digit | KBLI 4 Digit | KBLI 5 Digit | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | RTH-8 | BJ | P-1 | P-2 | W | R2 | R3 | R4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | K-1 | K-2 | K-3 | KT | TR | HK | |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Jalur Hijau | Badan Jalan | Pertanian Tanaman Pangan | Hortikultura | Pariwisata | Kepada tan Tinggi | Kepada tan Sedang | Kepada tan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | Perdagangan Jasa Skala Kota | Perdagangan Jasa Skala Skala WP | Perdagangan Jasa Skala Sub WP | Perkantoran | Transportasi | Pertahanan dan Keamanan | |
| | | Pemukaman Umum) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERTAMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 283 | Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat | 081 | 0810 | 08101/08102/08103/08104/08109 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 284 | 284 | Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL | 089 | 0899 | 08995/08999 | X | X | X | X | X | X | X | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | B1,B2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 285 | 285 | Penyediaan sarana dan prasarana dasar penunjang kawasan perkotaan | | | | X | T2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |

Keterangan :

- I** pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kabupaten Sragen.
- T1** meliputi yang diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
- T2** meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya
- T3** meliputi kegiatan diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- B1** meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang
- B2** meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin)
- B3** meliputi kegiatan diizinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu tempat hiburan karaoke, hiburan permainan ketangkasan dan hiburan lainnya dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter
- B4** meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat skala mikro dan kecil sesuai dengan Perda RTRW
- B5** meliputi kegiatan yang diizinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (pengolahan limbah, parkir dan RTH)
- X** pemanfaatan tidak diizinkan

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

| Zona | Sub-Zona | Kode | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | Luas Kavling Minimum | KDH Minimum (%) |
|---|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| Zona Badan Air | Badan Air | BA | - | - | - | - |
| Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | 30 | 0.6 | - | 70 |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Taman Kecamatan | RTH-3 | 40 | 0.4 | - | 60 |
| | Taman Kelurahan | RTH-4 | 40 | 0.4 | - | 60 |
| | Pemakaman | RTH-7 | 5 | 0.05 | - | 80 |
| | Jalur Hjalau | RTH-8 | 30 | 0.3 | - | 70 |
| Zona Badan Jalan | Badan Jalan | BJ | - | - | - | 10 |
| Zona Pertanian | Tanaman Pangan LP2B | P-1 | 10 | 0.1 | - | 90 |
| | Tanaman Pangan (non LP2B) | P-1 | 80 | 4.0 | - | 10 |
| | Hortikultura | P-2 | 60 | 1.8 | - | 10 |
| Zona Pariwisata | Pariwisata | W | 80 | 3.2 | - | 10 |
| Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 80 | 6.4 | 60 | 10 |
| | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 80 | 4.0 | 72 | 10 |
| | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 75 | 3.0 | 90 | 15 |
| Zona Campuran Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota | SPU-1 | 80 | 4.8 | - | 20 |
| | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | 80 | 4.0 | - | 15 |
| | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | 80 | 3.2 | - | 10 |
| Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 80 | 6.4 | - | 10 |
| | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 80 | 4.0 | - | 10 |
| | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | 80 | 3.2 | - | 10 |
| Zona Perkantoran | Perkantoran | KT | 80 | 6.4 | - | 10 |
| Zona Transportasi | Transportasi | TR | 60 | 1.8 | - | 15 |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | 80 | 4.0 | - | 10 |

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN TATA BANGUNAN

| Zona | Sub-Zona | Kode | Ketinggian Bangunan | Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m) | | | | | | | | | | | | Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBBS) | Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBBS) |
|------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Terhadap Jalan | | | | | | Terhadap Sungai | | | | Garis Sempadan Bangunan Minimum Terhadap Saluran Irigasi | Terhadap Rel Kereta Api | | |
| | | | | Kolektor Primer | Kolektor Sekunder | Lokal Primer | Lokal Sekunder | Lingkungan Primer | Lingkungan Sekunder | Sungai Bertanggul | Kedalaman Sungai < 3 m | Kedalaman Sungai < 20m | Kedalaman Sungai > 20m | Garis Sempadan Irigasi | Bangunan Terhadap 1 saluran drainase terluar rel kereta api | | |
| Zona Badan Air | Badan Air | BA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | 8 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Taman Kecamatan | RTH-3 | 8 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Taman Kelurahan | RTH-4 | 8 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Pemakaman | RTH-7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jalur Hjalur | RTH-8 | 8 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Badan Jalan | Badan Jalan | BJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zona Pertanian | Tanaman Pangan | P-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hortikultura | P-2 | 12 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Pariwisata | Pariwisata | W | 12 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 32 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 20 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 16 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota | SPU-1 | 24 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | 20 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | 16 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 32 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 20 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | 16 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Perkantoran | Perkantoran | KT | 32 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Transportasi | Transportasi | TR | 12 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | 20 | 14.5 | 12 | 10.75 | 6.75 | 5 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 2.5 | 15 | - | - |

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|--------------------------|-----------------------|-------|--|
| Zona Badan Air | Badan Air | BA | <ul style="list-style-type: none"> tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; pengembangan tanggul sungai fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. |
| Zona Perlindungan | Perlindungan Setempat | PS | <ul style="list-style-type: none"> tersedianya jalan insepksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; pengembangan tanggul sungai fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Taman Kecamatan | RTH-3 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; |
| | Taman Kelurahan | RTH-4 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang |
| | Pemukaman | RTH-7 | <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang |
| | Jalur Hjaiu | RTH-8 | <ul style="list-style-type: none"> mengembangkan jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah karbon dan tidak menyerap air secara besar; penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. Khusus untuk kegiatan penunjang transportasi (Stasiun) wajib menyediakan pengolahan limbah, tempat parkir, dan ruang terbuka hijau |
| Zona Pertanian | Tanaman Pangan | P-1 | <ul style="list-style-type: none"> ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|-----------------|----------------------------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan • penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian. • Untuk kegiatan pada sub zona P-1 diluar LP2B wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir; dan Ruang terbuka hijau minimum 10% |
| | Hortikultura | P-2 | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan lingkungan minimal 6 meter • Ruang terbuka hijau minimum 10% • Menyediakan kawasan resapan air • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari airpermukaan. • penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi. • Untuk kegiatan industri pada sub zona P-2 wajib memenuhi ketentuan prasarana minimal berupa Pengolahan limbah, Penyediaan tempat parkir, dan Ruang terbuka hijau minimum 10% |
| Zona Pariwisata | Pariwisata | W | <ul style="list-style-type: none"> • Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil • menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan; • Penyediaan ruang terbuka hijau minimum 10%; • Penyediaan pengolahan limbah domestic dan non domestic; • Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umu, Jalur pejalan kaki; • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. |
| Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawa sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. |

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|------|----------------------------|------|--|
| | | | <p>b. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani</p> <p>c. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat.</p> <p>d. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.</p> <p>e. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.</p> |
| | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; • Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling; • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof”; • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 6 (enam) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan; • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan; • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. |
| | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • Jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. • Membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; |

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|----------------------------|----------------|-------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green Roof” • Menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • Bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • Dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Setiap kegiatan jasa, usaha, gudang dan industri skala UMK wajib menyediakan tempat parkir; • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. |
| Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota | SPU-1 | <ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. • Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; • Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan; • Penyediaan akses bagi penyandang cacat; |

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|------|---------------------|-------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; Fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. |
| | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; Hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; Hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; Penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; Penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; Penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan; Penyediaan akses bagi penyandang cacat; Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik; fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan |
| | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; |

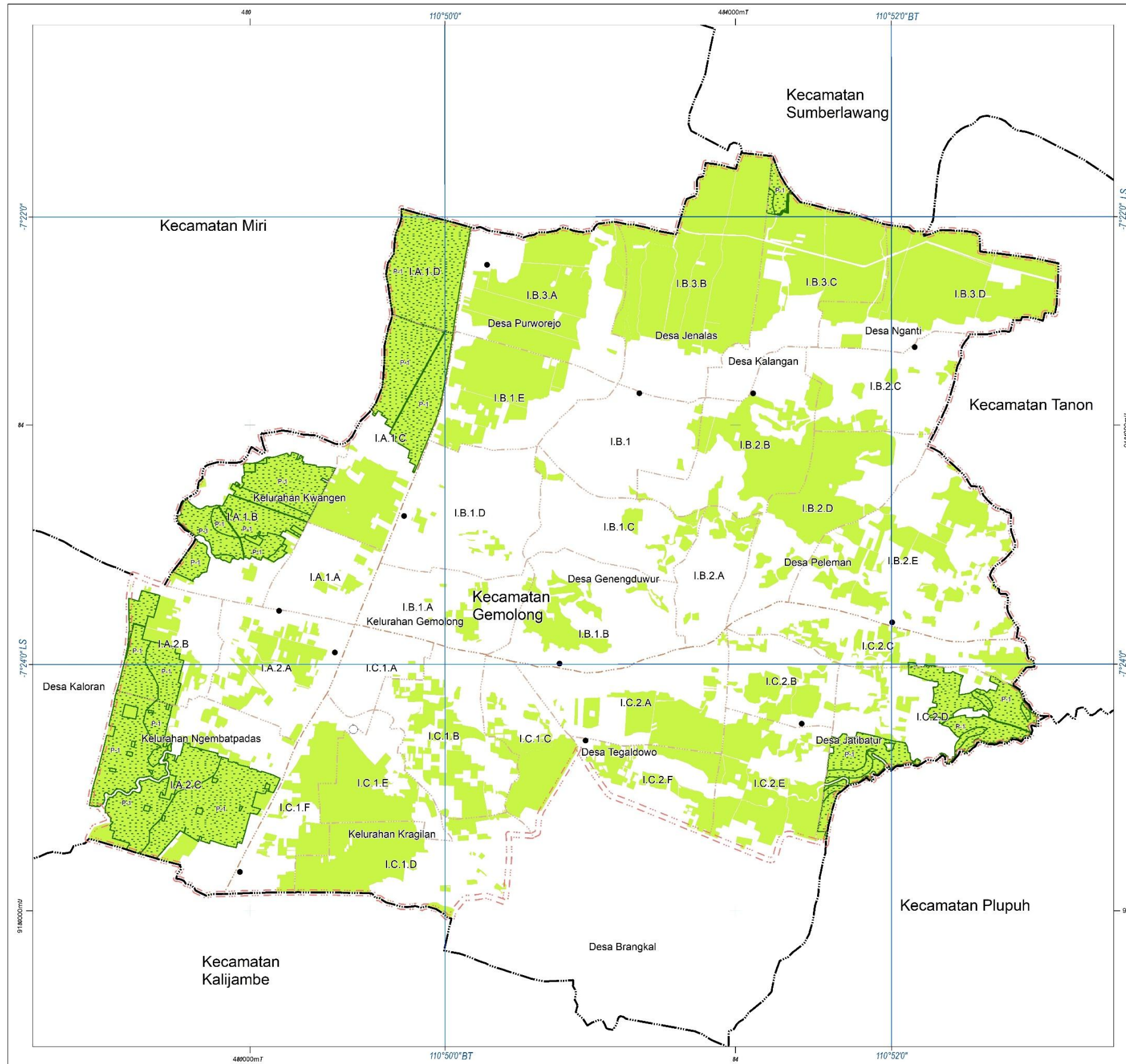
| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|---------------------------|---------------------------------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. penyediaan akses bagi penyandang cacat. Wajib menyediakan pengolahan limbah domestik. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan |
| Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| | Perdagangan dan Jasa Skala SWP | K-3 | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| Zona Perkantoran | Perkantoran | KT | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| Zona Transportasi | Transportasi | TR | <ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; |

| Zona | Sub-Zona | Kode | Sarana dan Prasarana Minimal |
|------------------------------|-------------------------|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; • menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat. |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | <p>Ketentuan dan Keharusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya. 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>Larangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD |

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | |
|--|--|
| <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <p>○ Ibu Kota Kecamatan</p> <p>● Ibu Kota Desa</p> | <p>Batas Perencanaan</p> <p>--- Batas WP</p> <p>--- Batas SWP</p> <p>--- Batas Blok</p> <p>--- Batas Sub Blok</p> |
| <p>Batas Administrasi</p> | |

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

■ Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

■ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok

I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

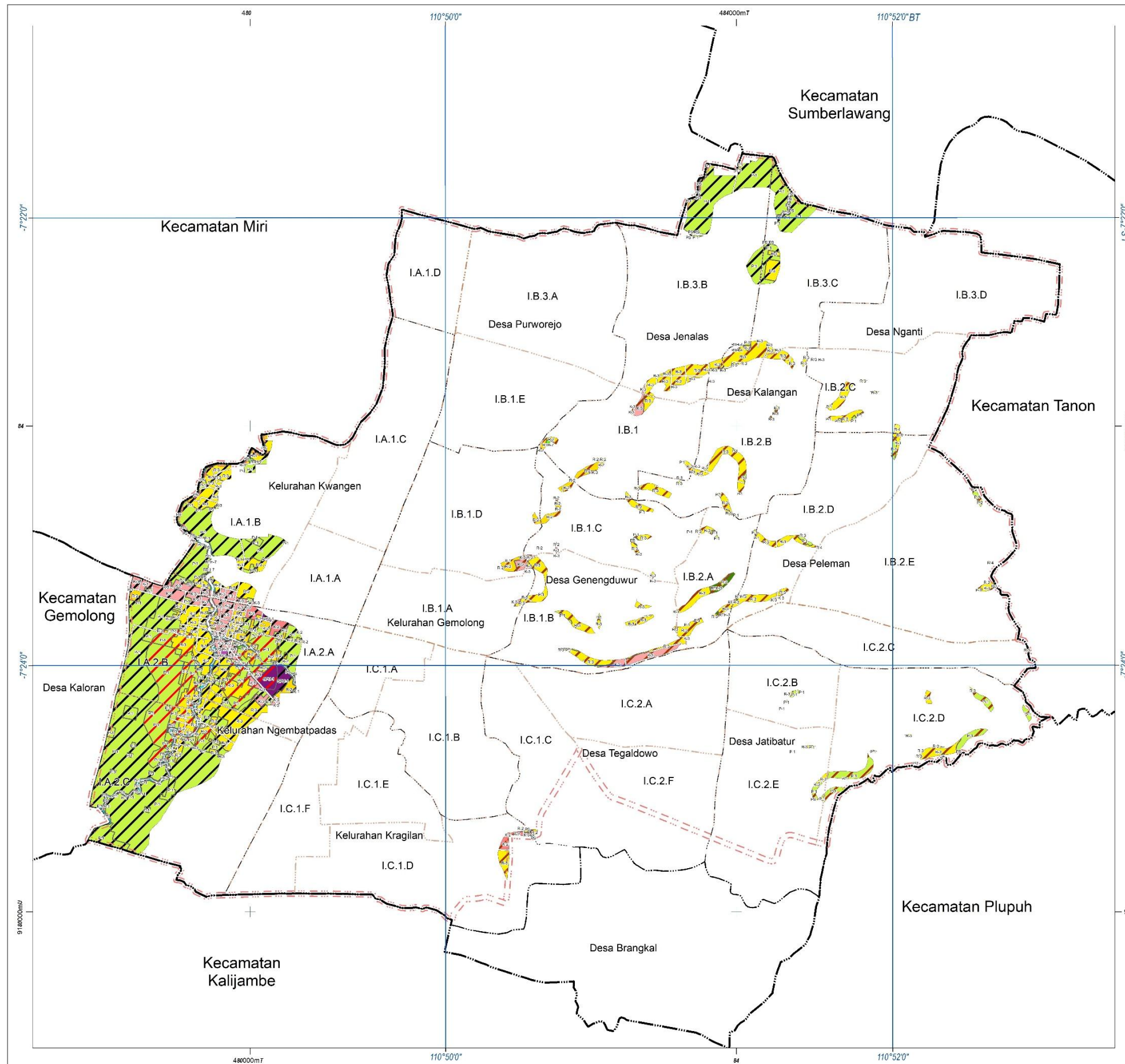
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Kantor Camat | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Kantor Desa | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA POLA RUANG

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Zona Ruang Terbuka Hijau | Zona Perumahan |
| ■ Taman Kecamatan | ■ Perumahan Kepadatan Rendah |
| ■ Taman Kelurahan | ■ Perumahan Kepadatan Sedang |
| ■ Pemakaman | ■ Perumahan Kepadatan Tinggi |
| Zona Perlindungan Setempat | Zona Perdagangan dan Jasa |
| ■ Perlindungan Setempat | ■ Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| | ■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | ■ SPU Skala Kota |
| | ■ SPU Skala Kelurahan |
| | Zona Pertanian |
| | ■ Tanaman Pangan |
| | ■ Hortikultura |

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

Kawasan Rawan Bencana

| | |
|---|--|
| ■ | Resiko Banjir Skala Sedang |
| ■ | Resiko Banjir Skala Tinggi |
| ■ | Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah |

Penjelasan Kode Lokasi

| | | | | |
|--------|----|-----|------|----------|
| IA.1.A | WP | SWP | Blok | Sub Blok |
|--------|----|-----|------|----------|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

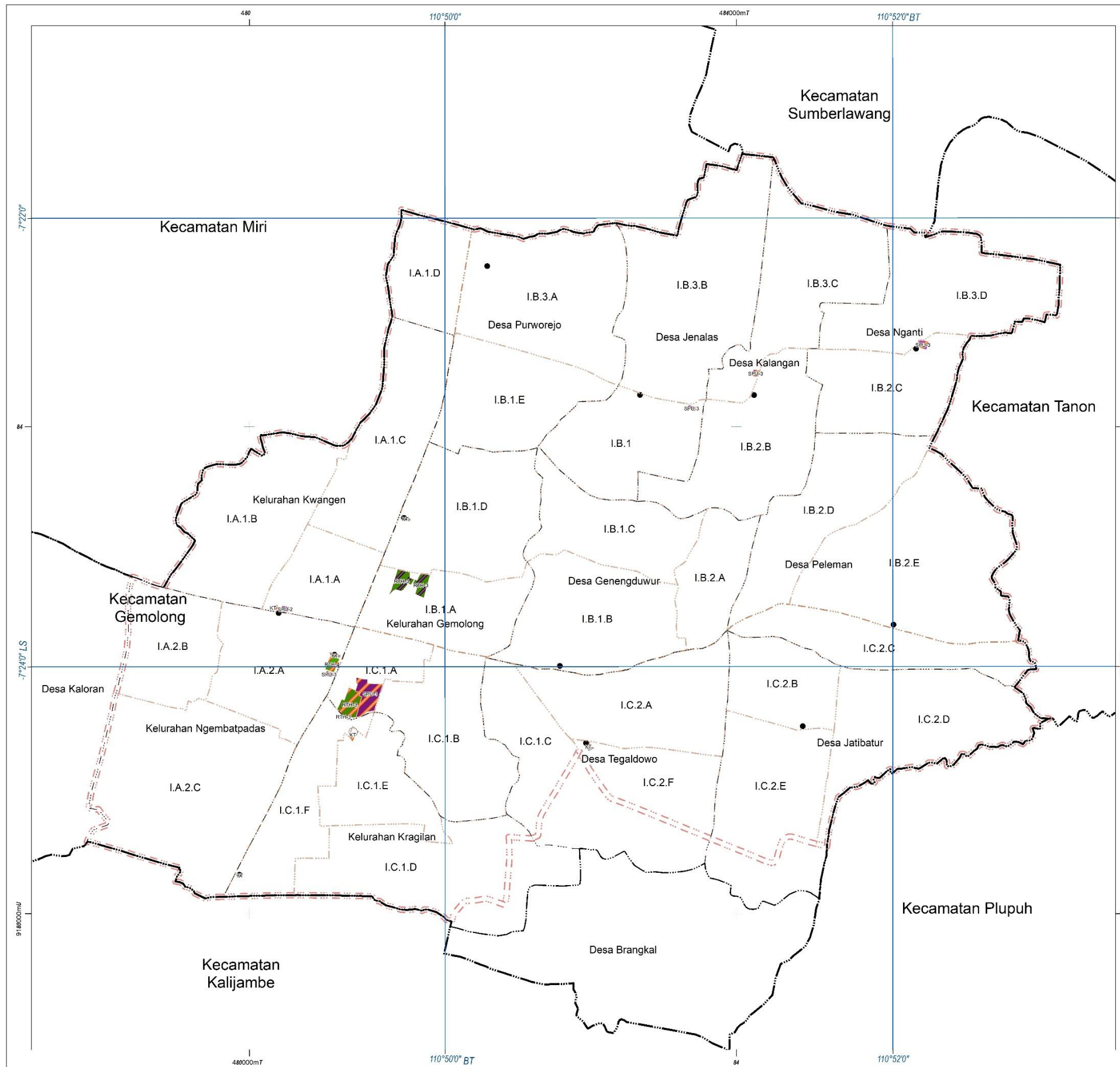
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN VIII
**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN**
TENTANG
**RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Desa | Batas Kecamatan | Batas WP |
| | Batas Desa/Kelurahan | Batas SWP |
| | | Batas Blok |
| | | Batas Sub Blok |

**RENCANA POLA RUANG
RENCANA KAWASAN LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau**

| |
|-----------------|
| Taman Kecamatan |
| Taman Kelurahan |

**RENCANA KAWASAN BUDIDAYA
Zona Sarana Pelayanan Umum**

| |
|---------------------|
| SPU Skala Kota |
| SPU Skala Kecamatan |
| SPU Skala Kelurahan |

Zona Perkantoran

| |
|-------------|
| Perkantoran |
|-------------|

KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Tempat Evakuasi Bencana

| |
|---------------------------|
| Tempat Evakuasi Akhir |
| Tempat Evakuasi Sementara |

Penjelasan Kode Lokasi

| | |
|----------|----------|
| WP | WP |
| SWP | SWP |
| Blok | Blok |
| Sub Blok | Sub Blok |
| I.A.1.A | I.A.1.A |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

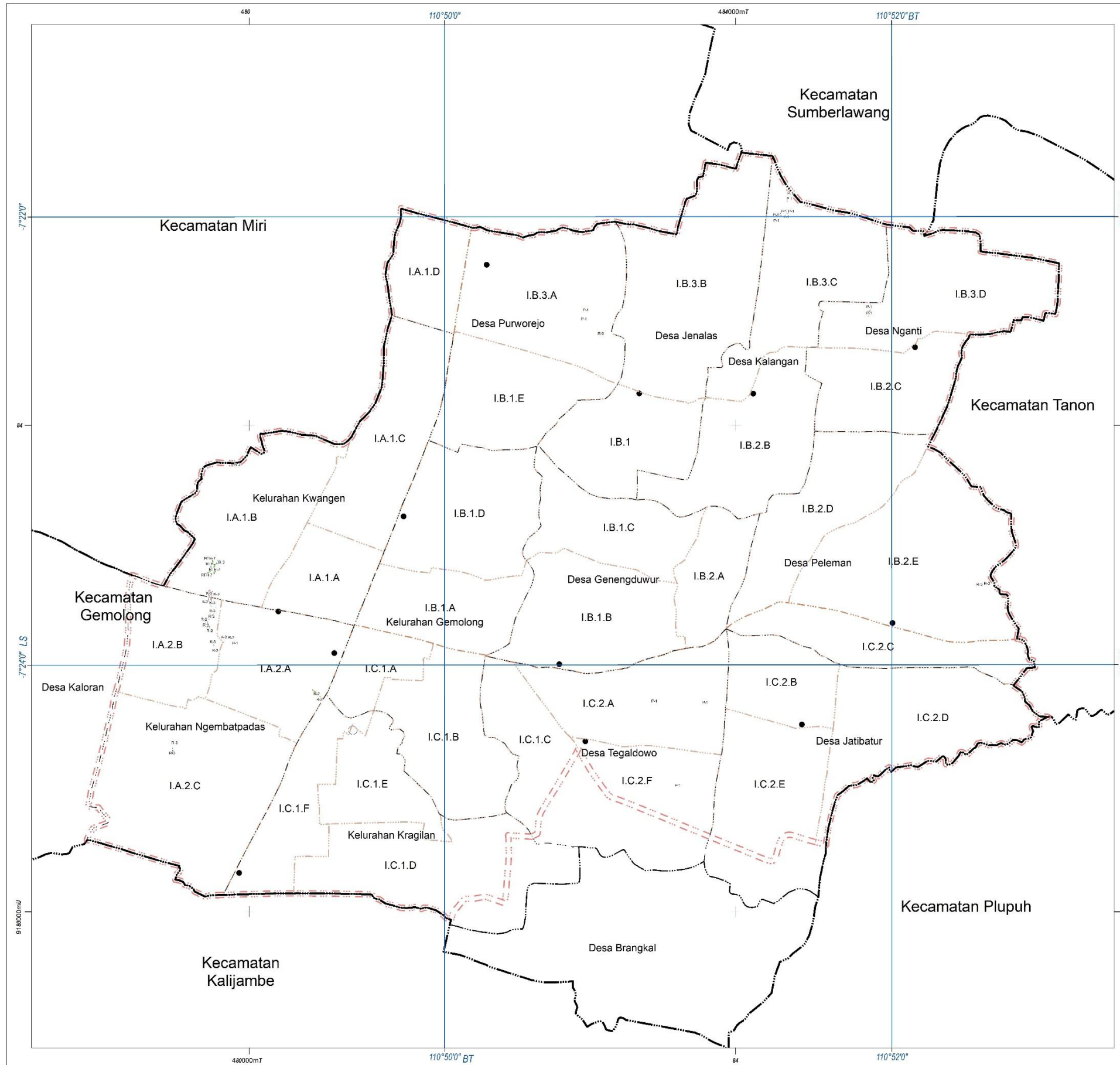
- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
- Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
- Pengolahan data tahun 2021-2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA 1:30.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Ibu Kota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| Ibu Kota Desa | Batas Desa/Kelurahan | Batas WP |
| | Batas Blok | Batas SWP |
| | | Batas Sub Blok |

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau

| | |
|--|-----------------|
| | Taman Kelurahan |
| | Pemakaman |

ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan

| | |
|--|----------------------------|
| | Perumahan Kepadatan Sedang |
| | Perumahan Kepadatan Tinggi |

Zona Perdagangan dan Jasa

| | |
|--|--------------------------------|
| | Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
|--|--------------------------------|

Zona Pertanian

| | |
|--|----------------|
| | Tanaman Pangan |
|--|----------------|

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

| | |
|--|-----------------|
| | Sempadan Sungai |
|--|-----------------|

Penjelasan Kode Lokasi

| | | |
|--------|--------|--------|
| IA.1.A | IB.1.A | IC.1.A |
| IA.2.A | IB.2.A | IC.2.A |
| IA.3.A | IB.3.A | IC.3.A |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

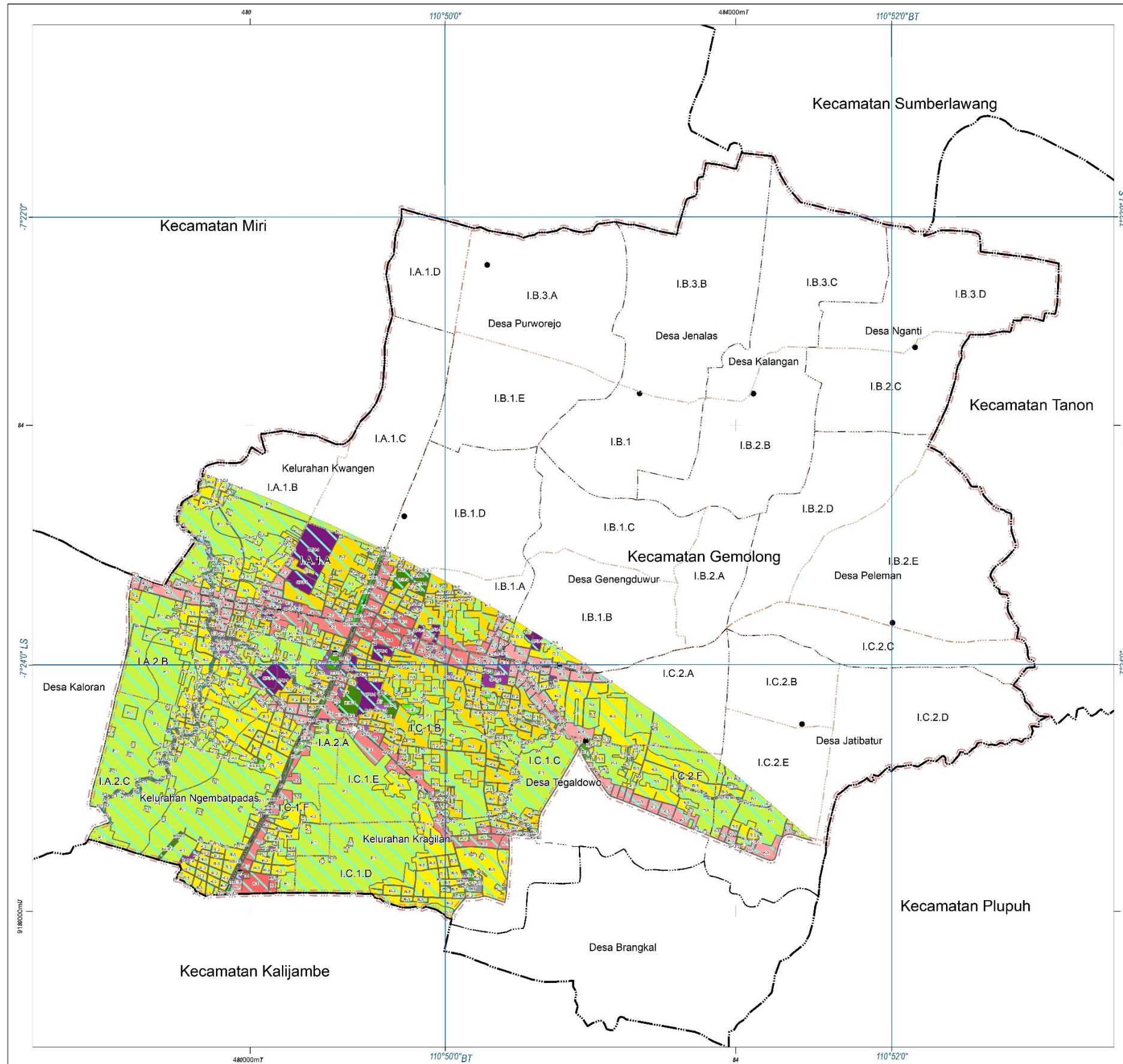
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 -2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN**

SKALA 1:30.000
0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

RENCANA POLA RUANG

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ZONA LINDUNG | ZONA BUDI DAYA |
| Badan Air | Zona Badan Jalan |
| ■ Badan Air | ■ Badan Jalan |
| Perlindungan Setempat | Zona Perkantoran |
| ■ Perlindungan Setempat | ■ Perkantoran |
| Ruang Terbuka Hijau | Zona Perdagangan dan Jasa |
| ■ Taman Kecamatan | ■ Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| ■ Taman Kelurahan | ■ Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| ■ Pemakaman | ■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP |
| ■ Jalur Hijau | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| | ■ Pertahanan dan Keamanan |
| | Zona Pertanian |
| | ■ Tanaman Pangan |
| | Zona Perumahan |
| | ■ Perumahan Kepadatan Tinggi |
| | ■ Perumahan Kepadatan Sedang |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum |
| | ■ SPU Skala Kota |
| | ■ SPU Skala Kecamatan |
| | ■ SPU Skala Kelurahan |
| | Zona Transportasi |
| | ■ Transportasi |

KETENTUAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

■ Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
Sub Blok
I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

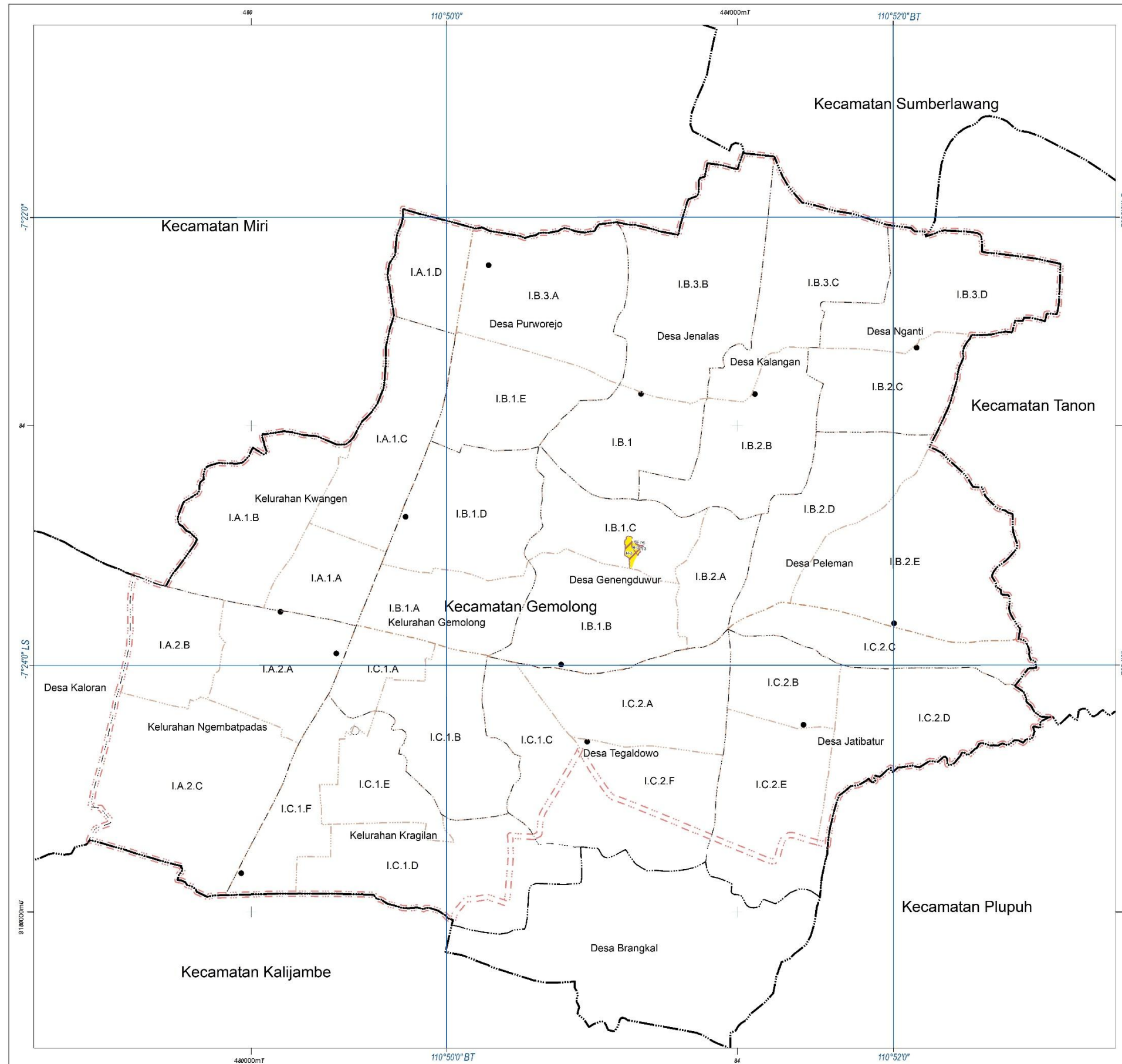
1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023-2043





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN GEMOLONG TAHUN 2023 -2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

SKALA 1:30.000
0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grd Geografis dan Grid UTM Zona 49S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ○ Ibu Kota Kecamatan | — Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ● Ibu Kota Desa | - - - Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |
| | | --- Batas Sub Blok |

**RENCANA POLA RUANG
KETENTUAN KHUSUS PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

ZONA LINDUNG
Perindungan Setempat
Perindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sedang

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
Sub Blok
I.A.1.A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
3. Pengolahan data tahun 2021-2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011 - 2031

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI